



Pedoman Regional bagi Negara-negara
Anggota ASEAN tentang Peran Pekerja Sosial
dan Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih
Luas dalam Pengurangan Risiko Bencana dan
Ketahanan Iklim



one vision
one identity
one community



Pedoman Regional bagi Negara-negara Anggota
ASEAN tentang Peran Pekerja Sosial dan
Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih Luas
dalam Pengurangan Risiko Bencana dan
Ketahanan Iklim

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967.

Negara-negara anggota Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand and Viet Nam.

The ASEAN Secretariat di Jakarta, Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

The ASEAN Secretariat

Community Relations Division (CRD)

70A Jalan Sisingamangaraja

Jakarta 12100, Indonesia

Phone: (62 21) 724-3372, 726-2991

Fax: (62 21) 739-8234, 724-3504

Email: public@asean.org

Catalogue-in-Publication Data:

Regional Guidance for ASEAN Member States on the Role of Social Workers and the Wider Social Service Workforce in Disaster Risk Reduction and Climate Resilience.

Jakarta: ASEAN Secretariat, September 2024.

361.3

1. ASEAN – Social Service – Social Workers

2. Vulnerable Populations – Disaster Risks

ASEAN: A Community of Opportunities for All

Photo Credits:

Cover: UNICEF/Arimacs Wilander

Teks dalam publikasi ini dapat dikutip atau dicetak ulang secara bebas, asalkan diberikan pengakuan yang sesuai dan salinan yang berisi materi yang dicetak ulang dikirimkan ke Divisi Hubungan Masyarakat (CDR) Sekretariat ASEAN, Jakarta.

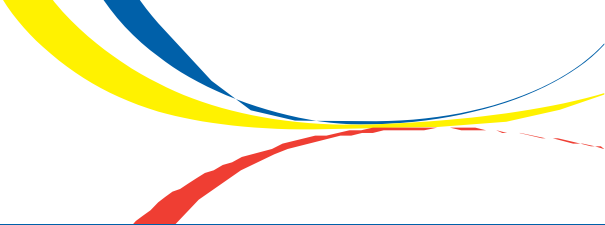
Informasi umum tentang ASEAN dapat ditemukan secara online di Situs Web ASEAN: www.asean.org

Publikasi ini terwujud berkat dukungan pendanaan dari UNICEF East Asia and Pacific Regional Office.

Hak cipta Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2024.

Seluruh hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari laporan ini yang boleh direproduksi dalam bentuk apa pun, baik dengan fotokopi maupun dengan cara elektronik atau mekanis lainnya, termasuk sistem penyimpanan atau pengambilan informasi, tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta dan penerbit laporan ini.



Kata pengantar

Pedoman Regional bagi Negara-negara Anggota ASEAN tentang Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih Luas dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Iklim merupakan tonggak penting dalam meningkatkan kesejahteraan, konektivitas, ketahanan, dan keamanan anak-anak di negara-negara anggota ASEAN.

Penyusunan Pedoman ini bertujuan untuk mendukung operasionalisasi Peta Jalan ASEAN untuk Implementasi akan Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif. Pedoman ASEAN ini dimaksudkan untuk mendukung para pembuat kebijakan, manajer, dan anggota tenaga kerja layanan sosial di Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) untuk memperkuat peran pekerja sosial dan tenaga kerja layanan sosial yang lebih luas dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Iklim.

Kami percaya bahwa Pedoman ini akan bermanfaat bagi Negara-negara Anggota ASEAN sebagai dasar untuk mengembangkan pedoman dan rencana aksi nasional yang lebih spesifik dan relevan yang dapat mempertimbangkan konteks masing-masing negara.

Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD)



Ucapan Terima Kasih

ASEAN mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka yang terlibat dalam pengembangan Pedoman ini. Kami ingin menyampaikan penghargaan atas komitmen dan kepemimpinan para titik fokus Kelompok Kerja Teknis ASEAN untuk Pengembangan Pedoman Regional bagi Negara-negara Anggota ASEAN tentang Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih Luas dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Iklim, dan Pertemuan Pejabat Senior tentang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD) yang telah menjadi kekuatan pendorong yang mewujudkan Pedoman ini.

Pedoman Regional ini mendapat manfaat dari Dialog ASEAN tatap muka untuk Memperkuat Penyediaan Layanan Sosial untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Iklim: Tinjauan ahli terhadap Pedoman Regional ASEAN tentang Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih Luas dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Ketahanan Iklim yang diadakan di Manila, Filipina, dari 16—17 Mei 2024 yang mempertemukan pejabat SOMSWD, NDMA, dan Kesejahteraan Sosial untuk berbagi pengalaman dan merefleksikan rancangan Pedoman Regional. Dialog ASEAN diselenggarakan berkat pendanaan berlimpah dari Pemerintah Norwegia.

Kepemimpinan SOMSWD Filipina dalam pengembangan Pedoman ini sangat dihargai. Sekretariat ASEAN (ASEC) juga patut kami hargai karena telah mengoordinasikan proses pengembangan, termasuk mengoordinasikan kontribusi Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) terhadap pedoman ini. Kami berterima kasih kepada Kantor Regional Asia Timur dan Pasifik Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) atas dukungan finansial dan teknis mereka dalam mengembangkan Pedoman ini.

Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD)

Akronim

AADMER	Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat
AHA	Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan bagi Penanggulangan Bencana
AMS	Negara-negara Anggota ASEAN
APMCDRR	Konferensi Tingkat Menteri Asia-Pasifik untuk Pengurangan Risiko Bencana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
ATCSW	Komite Teknis ASEAN tentang Kesejahteraan Sosial
CBDRM	Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat
CCA	Adaptasi Perubahan Iklim
CCR	Pengurangan Perubahan Iklim
CCRI	Indeks Risiko Iklim Anak-anak
DRM	Manajemen Risiko Bencana
DRR	Pengurangan Risiko Bencana
GBV	Kekerasan Berbasis Gender
IMS	Sistem Manajemen Insiden
MHPPS	Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial
NAPs	Rencana Adaptasi Nasional
NDMA	Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional
SOGIESCSOP	Orientasi Seksual, Identitas Gender, Ekspresi Gender, dan Karakteristik Seks
SoP	Prosedur Operasi Standar
SSW	Tenaga Kerja Layanan Sosial
UNDRR	Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> (Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa)
WFP	<i>World Food Programme</i> (Program Pangan Dunia)

Glosarium

Definisi ini sejalan dengan Pasal IV Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif; dan diadaptasi dari definisi tenaga kerja dari Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global (GSSWA) dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Item	Deskripsi	Sumber
Sektor terkait	Kolaborasi antara pekerja sosial dan pekerja di sektor terkait – perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keadilan – dapat meningkatkan hasil bagi orang-orang yang menghadapi hambatan dan tantangan. Pendekatan multisektoral di seluruh sektor terkait sangat penting untuk pemberian layanan yang efektif guna meningkatkan hasil bagi orang-orang yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Contohnya termasuk administrator perlindungan sosial yang menasihati keluarga tentang kelayakan untuk mendapatkan tunjangan dan hak bantuan sosial, staf rumah sakit yang berkoordinasi dengan pekerja masyarakat untuk memulangkan individu yang rentan, sekolah yang menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, dan sistem peradilan yang memungkinkan akses ke bantuan hukum gratis.	Pedoman Regional Negara-negara Anggota ASEAN tentang Penguatan Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih Luas di Sektor Peradilan.
Pekerja terkait	Profesional dan paraprofesional yang terlibat dalam sektor seperti pendidikan, kesehatan, atau peradilan, yang memiliki peran penting terkait perawatan, dukungan, pencegahan, pemberdayaan, serta perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Mereka bukan penyedia layanan sosial utama, melainkan menjalankan peran spesialis di sektor mereka sendiri. Peran dan tanggung jawab yang mereka lakukan dapat menjadi kunci bagi pemberian layanan sosial yang efektif (contohnya dapat mencakup staf sekolah yang memastikan penempatan di sekolah dan dukungan tambahan di sekolah bagi anak yang ditempatkan bersama pengasuh angkat atau pengasuh kekerabatan; staf rumah sakit yang berhubungan erat dengan perawat, pekerja perawatan, dan pekerja layanan sosial di masyarakat untuk mempersiapkan pemulangan dari rumah sakit bagi orang tua yang rentan atau penyandang disabilitas; dan, bagi ibu dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah daerah mengatur perumahan yang layak dan terjangkau serta berkoordinasi dengan polisi dan layanan sosial mengenai rencana keselamatan).	

Item	Deskripsi	Sumber
	Demikian pula, sebagai imbalannya, pekerjaan tenaga kerja layanan sosial dapat membantu meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan oleh sektor terkait. Misalnya, hasil kesehatan dapat ditingkatkan melalui penanganan faktor sosial dan lingkungan yang terkait dengan penyakit dan kondisi kesehatan kronis, dalam pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan rehabilitasi. ¹	tenaga kerja dari Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global (GSSWA).

¹ Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif.

Item	Deskripsi	Sumber
Tindakan antisipatif	Tindakan antisipatif memungkinkan pekerja kemanusiaan dan masyarakat yang terdampak untuk membuat keputusan yang tepat sebelum terjadi krisis kemanusiaan – menghemat waktu dan uang; mencegah pengungsian, penyakit, hilangnya mata pencaharian; dan menjaga martabat mereka yang terdampak.	Tindakan Antisipatif & Perlindungan Anak - Bertindak Dini untuk Melindungi Anak dengan Lebih Baik dalam Keadaan Darurat, IFRC UNDRR Memahami Bencana Risk-preventionweb.net
Manajemen Kasus	Manajemen Kasus (dalam perlindungan anak) adalah suatu cara mengatur dan melaksanakan pekerjaan untuk mengatasi kebutuhan anak perorangan (dan keluarga mereka) secara tepat, sistematis dan tepat waktu, melalui dukungan langsung dan/atau rujukan, dan sesuai dengan tujuan proyek atau program.	Aliansi untuk Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan (2014). Pedoman Antar Lembaga untuk Perlindungan Anak dan Manajemen Kasus.
Anak	Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Semua orang yang berusia 18 tahun ke atas dianggap dewasa. Hal ini penting untuk ditetapkan karena dalam beberapa konteks, penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual, sering kali dianggap secara keliru dan disebut sebagai anak abadi.	Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 1.
Perubahan iklim	Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca ... aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama karena pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas.... Dampak perubahan saat ini antara lain adalah kekeringan parah, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan air laut, banjir, mencairnya es di kutub, badai dahsyat dan menurunnya keanekaragaman hayati.	Apa itu Perubahan Iklim? Perserikatan Bangsa-Bangsa
Adaptasi Perubahan Iklim	Mengacu pada perubahan dalam proses, praktik, dan struktur untuk memoderasi potensi kerusakan atau memanfaatkan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Secara sederhana, negara dan masyarakat perlu mengembangkan solusi adaptasi dan menerapkan tindakan untuk menanggapi dampak perubahan iklim saat ini dan di masa mendatang.	Perubahan Iklim PBB, UNFCC.
Disabilitas	Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, psikososial, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

Item	Deskripsi	Sumber
Bencana	Gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat dalam skala apa pun akibat kejadian berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi paparan, kerentanan, dan kapasitas, yang mengakibatkan satu atau lebih hal berikut: kerugian dan dampak pada manusia, material, ekonomi, dan lingkungan. Dampak bencana dapat bersifat langsung dan lokal, tetapi sering kali meluas dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dampaknya dapat menguji atau melampaui kapasitas suatu komunitas atau masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri, dan karenanya mungkin memerlukan bantuan dari sumber eksternal, yang dapat mencakup yurisdiksi tetangga, atau yang berada di tingkat nasional atau internasional. Bencana dapat dibagi menjadi dua kategori utama: • Bencana yang terjadi perlahan dan muncul secara bertahap dari waktu ke waktu. Bencana yang terjadi perlahan dapat dikaitkan dengan, misalnya, kekeringan, penggurunan, kenaikan permukaan laut, penyakit epidemik. • Bencana yang terjadi tiba-tiba yang dipicu oleh peristiwa berbahaya yang muncul dengan cepat atau tidak terduga. Bencana yang terjadi tiba-tiba dapat dikaitkan dengan, misalnya, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang, ledakan bahan kimia, kegagalan infrastruktur kritis, kecelakaan transportasi. Dengan demikian, bencana bisa terjadi karena alam atau buatan manusia, atau keduanya, dengan tipologi penyebabnya mulai dari faktor klimatologi, meteorologi, hidrologi, geofisika, biologi hingga faktor teknologi/buatan manusia.	Terminologi Kerangka Kerja Sendai UNDRR 2023 tentang Pengurangan Risiko Bencana. Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global, 'Laporan Keadaan Tenaga Kerja Layanan Sosial 2022: Peran Penting Tenaga Kerja Layanan Sosial dalam Konteks Kemanusiaan', 2022. Web Pencegahan Bencana UNDRR
Pengurangan Risiko Bencana (DRR)	Pengurangan risiko bencana ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada serta mengelola risiko yang tersisa, yang semuanya berkontribusi untuk memperkuat ketahanan dan dengan demikian mencapai pembangunan berkelanjutan.	Terminologi Kerangka Kerja Sendai UNDRR 2023 tentang Pengurangan Risiko Bencana. Lihat juga Kotak 1.

Komunitas/populasi terpinggirkan

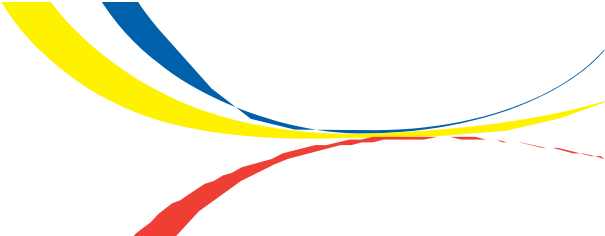
Kelompok-kelompok orang yang berbeda dalam suatu budaya, konteks dan sejarah tertentu berisiko mengalami diskriminasi berganda karena adanya interaksi karakteristik pribadi atau alasan yang berbeda, seperti jenis kelamin, gender, usia, etnis, agama atau kepercayaan, status kesehatan, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, pendidikan atau pendapatan, atau tinggal di berbagai lokasi geografis..

Kelompok terpinggirkan
- Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Barat.

Item	Deskripsi	Sumber
Minoritas	Minoritas etnis, agama, atau bahasa adalah setiap kelompok orang yang jumlahnya kurang dari setengah populasi di seluruh wilayah suatu negara yang anggotanya memiliki kesamaan karakteristik budaya, agama, atau bahasa, atau gabungan dari semua itu. Seseorang dapat dengan bebas menjadi bagian dari minoritas etnis, agama, atau bahasa tanpa persyaratan kewarganegaraan, tempat tinggal, pengakuan resmi, atau status lainnya.	Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang minoritas dan hak asasi manusia.
Paraprofesional atau para-pekerja sosial	Orang yang dilatih melalui pelatihan non-gelar untuk menjalankan fungsi pekerjaan sosial tertentu, sambil bekerja di samping atau mendukung pekerjaan seorang profesional di bidang yang sama. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan individu dalam situasi dan kelompok rentan melalui penjangkauan dan dukungan di tingkat masyarakat dan sangat penting dalam memberikan layanan sosial, khususnya di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Paraprofesional bekerja dalam berbagai peran sebagai staf berbayar atau sukarelawan.	Pasal IV Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif.
Tenaga kerja layanan sosial	Meliputi berbagai macam profesional dan paraprofesional pemerintah dan nonpemerintah, dan relawan tingkat masyarakat, yang bekerja dengan anak-anak, pemuda, wanita dan pria dewasa, orang tua, keluarga dan masyarakat, berfokus pada mereka yang memiliki kebutuhan tambahan yang terpinggirkan, dalam situasi rentan atau berisiko, untuk melindungi dan memastikan perkembangan dan kesejahteraan mereka yang sehat dan pemenuhan hak-hak mereka.	Pasal IV Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif.
	Tenaga kerja layanan sosial menyediakan layanan preventif, responsif dan promotif yang diinformasikan oleh humaniora dan ilmu sosial, pengetahuan adat, pengetahuan dan keterampilan khusus disiplin dan interdisipliner, dan prinsip-prinsip etika.	Diadaptasi dari definisi tenaga kerja dari Aliansi Tenaga Kerja Layanan Sosial Global (GSSWA).
	Pekerja layanan sosial melibatkan orang, struktur dan organisasi untuk: memfasilitasi akses ke layanan yang dibutuhkan, mengurangi kemiskinan, melawan dan mengurangi diskriminasi, mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia, dan mencegah dan menanggapi kekerasan, pelecehan, eksploitasi, pengabaian dan pemisahan keluarga.	

Item	Deskripsi	Sumber
Profesi pekerjaan sosial	Profesi utama dan inti dalam tenaga kerja layanan sosial. Profesi ini berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pembangunan sosial, kohesi dan partisipasi sosial, serta pemberdayaan dan pembebasan masyarakat. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, responsivitas gender, kepekaan budaya, tanggung jawab kolektif, dan rasa hormat terhadap keberagaman merupakan hal yang inti dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan adat, pekerjaan sosial melibatkan orang-orang dan struktur untuk mengatasi tantangan-tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.	Pasal IV Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif.
Pekerja sosial	Pekerja sosial adalah profesional dengan gelar akademis yang mempromosikan perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di banyak negara, istilah 'pekerja sosial' digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk pada orang yang mungkin menyediakan layanan ini tetapi tidak memiliki kualifikasi formal ini. Seperti disebutkan di atas, pekerja sosial bekerja dengan kelompok tertentu atau pada isu-isu tertentu, yang sering melibatkan keterlibatan individu dan populasi yang telah mengalami trauma. Karena alasan ini, mereka memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan kebutuhan ini dan diperlukan untuk memastikan pendekatan yang tidak merugikan. Pekerja sosial juga sering memainkan peran penting dalam koordinasi antarlembaga dan pengembangan sistem serta pengembangan kebijakan, implementasi, dan pemantauan. Manajemen kasus (lihat definisi di atas) merupakan salah satu tugas dan fungsi utama pekerja sosial, sebagai sarana tidak hanya untuk menilai dan menangani kebutuhan tetapi juga menyediakan, memantau, dan mengoordinasikan layanan dan rujukan. Namun, pekerja sosial tidak hanya menangani kasus-kasus individual, yang merupakan pendekatan responsif, tetapi juga mengadopsi pendekatan preventif dan promotif, dan dalam melakukannya melibatkan orang-orang di tingkat mikro (kasus), mezzo (kelompok atau komunitas) dan makro (nasional atau masyarakat).	Pasal IV Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif.; dan Definisi Global Pekerjaan Sosial Federasi Pekerja Sosial Internasional, 2014.

Item	Deskripsi	Sumber
Relawan	Relawan yang berkontribusi pada sektor layanan sosial tidak merupakan kelompok yang homogen. Mereka dapat berupa profesional, paraprofesional, atau nonprofesional, yang menerima atau tidak menerima tunjangan. Relawan memainkan peran tambahan dengan mengisi kesenjangan yang tidak tercakup oleh staf yang berkualifikasi profesional atau paraprofesional yang dibayar, paling sering di tingkat masyarakat. Relawan diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika inti yang memandu sektor layanan sosial, dengan nilai yang utama adalah 'tidak merugikan'. Organisasi, profesional, dan paraprofesional yang memanfaatkan layanan relawan harus tetap bertanggung jawab untuk mengatur perilaku mereka dan memastikan bahwa relawan memiliki tingkat kompetensi, keterampilan, pelatihan, dukungan, dan pengawasan yang diperlukan, untuk terlibat dengan aman dalam pekerjaan di lingkungan tertentu. Banyak pekerja sosial profesional dan anggota tenaga kerja layanan sosial lainnya memulai karier mereka setelah memperoleh pengalaman sebagai relawan, dan peran layanan sukarela sebagai batu loncatan menuju dunia tenaga kerja harus didorong. Pengembangan ini harus berada dalam kerangka karier berbasis kompetensi dan diatur, yang memungkinkan individu yang pertama kali melayani komunitas lokal mereka secara sukarela untuk melangkah maju, setelah memperoleh pelatihan berbasis kompetensi dan praktik yang diawasi, ke tingkat profesi yang lebih tinggi.	Pasal IV Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif.
Kerentanan (dalam konteks DRR)	Kondisi yang ditentukan oleh faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya.	Terminologi Kerangka Kerja Sendai UNDRR 2023 tentang Pengurangan Risiko Bencana.



Item	Deskripsi	Sumber
Ketahanan	Kemampuan suatu sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk melawan, menyerap, menampung, beradaptasi, mengubah dan pulih dari dampak bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dan fungsi dasar esensial melalui manajemen risiko.	Terminologi Kerangka Kerja Sendai UNDRR 2023 tentang Pengurangan Risiko Bencana.
	Kemampuan anak-anak, anak muda, rumah tangga, komunitas dan sistem untuk mengantisipasi, mencegah, menahan, mengelola dan mengatasi stres dan guncangan kumulatif.	UNICEF, Ketahanan, bantuan kemanusiaan dan perlindungan sosial untuk anak-anak di Eropa dan Asia Tengah.

Daftar Isi

Kata pengantar	3
Ucapan Terima Kasih	4
Akronim	5
Glosarium	6
1. Pendahuluan	15
1.1 Tujuan Pedoman Regional ini	15
1.2 Apa itu Pengurangan Risiko Bencana, Manajemen Risiko Bencana, dan Ketahanan dan Adaptasi Iklim?	15
1.3 Apa hubungan antara risiko, kerentanan, dan kapasitas?	17
1.4 Latar Belakang	18
1.5 Dampak Bencana	20
2. Peran penting tenaga kerja layanan sosial dalam melibatkan masyarakat dalam DRR dan CCA	29
2.1 Keterlibatan Masyarakat dan Penyediaan Informasi	29
2.2 Dukungan untuk populasi dan mata pencaharian yang rentan	31
2.3 Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (MHPSS)	32
2.4 Mencegah, mengurangi dan menanggapi risiko bahaya khususnya kekerasan terhadap anak Dan perempuan serta praktik-praktik yang merugikan	33
2.5 Interkoneksi antara strategi DRR-CCA dan penguatan SSW	35
2.6 Pengembangan Kebijakan	35
3. Peran dan tindakan utama tenaga kerja layanan sosial untuk melibatkan anak-anak dan pemuda, dan memastikan DRR yang berpusatkan anak	36
3.1 Penilaian risiko partisipatif dan perencanaan di tingkat masyarakat	37
3.2 Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat	37
3.3 Mobilisasi Masyarakat	37
3.4 Dukungan Anak-anak Rentan	38
3.5 Dukungan Psikososial	38
3.6 Pengamanan, Manajemen Kasus Perlindungan Anak dan Perawatan Alternatif	38
3.7 Advokasi	39
3.8 Inklusi gender dan sosial	39
4. Implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk memperkuat SSW dalam DRR-CCA	40
5. Kesimpulan	49
Lampiran A: Komitmen regional dan nasional pada hak asasi manusia, hak anak, kesetaraan gender, dan hak atas perlindungan sosial	50

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Pedoman Regional ini

Pedoman Regional ini berkontribusi pada Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif (selanjutnya disebut Deklarasi Ha Noi), yang menjelaskan upaya kolektif untuk meningkatkan peran pekerjaan sosial di kawasan tersebut, dengan fokus pada promosi kohesi sosial dan responsivitas terhadap berbagai kebutuhan Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pedoman ini menekankan pentingnya pekerjaan sosial dalam mengatasi tantangan sosial, mendukung populasi yang rentan, dan memajukan pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada komunitas ASEAN yang lebih bersatu dan penuh kasih sayang. Komitmen regional tambahan terhadap hak asasi manusia, hak anak, kesetaraan gender, dan hak atas perlindungan sosial tercantum dalam Lampiran A.

Pedoman Regional, yang diidentifikasi sebagai prioritas pembangunan berdasarkan Peta Jalan untuk Pelaksanaan Deklarasi Hanoi, akan mendukung para pembuat kebijakan, pengambil keputusan dan praktisi di otoritas perencanaan pemerintah dan di otoritas penanggulangan iklim dan bencana nasional (NDMA), yang bertanggung jawab atas tenaga kerja layanan sosial, dan di sektor terkait, di Negara-negara Anggota ASEAN untuk:

- i) memahami peran pekerja sosial dan tenaga kerja layanan sosial yang lebih luas dalam pengurangan risiko bencana (DRR), ketahanan iklim dan adaptasi perubahan iklim (CCA);
- ii) mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengintegrasikan CCA, ketahanan iklim dan DRR ke dalam perencanaan, pengembangan dan dukungan bagi tenaga kerja layanan sosial;
- iii) memastikan keterlibatan tenaga kerja layanan sosial dalam strategi dan rencana DRR-CCA nasional dan lokal.

1.2 Apa itu Pengurangan Risiko Bencana, Manajemen Risiko Bencana, dan Ketahanan dan Adaptasi Iklim?

Kotak 1. Apa itu Pengurangan Risiko Bencana (DRR)?

Pengurangan Risiko Bencana merupakan tujuan dari strategi dan rencana yang bertujuan untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi yang sudah ada, serta mengelola risiko yang tersisa. Efek gabungan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas individu, komunitas, dan masyarakat untuk menghadapi guncangan. Oleh karena itu, DRR juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan kebijakan Manajemen Risiko Bencana (DRM), dan tujuan serta sasarannya ditetapkan dalam strategi, kebijakan, dan rencana DRR. Strategi dan kebijakan DRR menetapkan tujuan dan sasaran ini dalam rentang waktu yang berbeda dan dengan target, indikator, dan kerangka waktu yang konkret.

Kebijakan DRR yang disepakati global ditetapkan dalam Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang didukung oleh PBB (selanjutnya disebut 'Kerangka Sendai'), yang bertujuan untuk "Pengurangan risiko bencana dan kerugian yang substansial dalam kehidupan, mata pencaharian dan kesehatan dan dalam aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan dari orang, bisnis, masyarakat dan negara".

Sumber: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Sementara Manajemen Risiko Bencana mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan, bantuan kemanusiaan berfokus pada penyediaan bantuan langsung kepada populasi yang terkena dampak. Oleh karena itu, meskipun terkait, keduanya merupakan komponen yang berbeda dari kerangka kerja manajemen darurat secara keseluruhan.

Perubahan iklim adalah suatu pemicu risiko bencana yang diketahui, dengan mengubah frekuensi dan intensitas kejadian bahaya, mempengaruhi kerentanan terhadap bahaya, dan mengubah pola paparan². Perubahan iklim melemahkan kemampuan negara-negara untuk mencapai tujuan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana. Dampak perubahan iklim yang diproyeksikan meliputi siklon, kekeringan, banjir, kenaikan permukaan air laut, dan penyakit menular. Oleh karena itu, sehubungan dengan DRR, proses jangka panjang Ketahanan Perubahan Iklim (CCR) dan Adaptasi Perubahan Iklim (CCA) menjadi semakin penting.

Pendekatan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) memainkan peran penting dalam membantu negara-negara melaksanakan komitmen iklim mereka dibawah Perjanjian Paris dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan program mereka, termasuk yang terkait dengan layanan sosial. Tujuan NAP adalah untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dengan membangun kapasitas dan ketahanan adaptif, dan untuk memfasilitasi integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan baru dan yang sudah ada.

Meskipun berbeda dalam banyak hal, kedua proses DRR dan CCA memiliki atribut yang sama terkait pengurangan kerentanan dan pembangunan ketahanan. Akibatnya, ada seruan global yang berkembang untuk mengintegrasikan DRR dan CCA, guna memastikan koherensi kebijakan dalam mengurangi risiko dan membangun ketahanan, yang didukung oleh pendanaan bencana dan iklim.

Kotak 2. Mengintegrasikan DRR dan CCA

Integrasi **DRR** dan **CCA** sangat penting untuk membangun ketahanan dan mengurangi kerentanan. Strategi, kerangka kerja, dan mekanisme pendanaan semakin mencerminkan konvergensi dan koherensi yang semakin jelas antara agenda perubahan iklim dengan agenda pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Ringkasan Kebijakan UNDRR tentang **Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim** mencantumkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: **Meningkatkan manajemen risiko bencana dan iklim yang komprehensif** dimana pendekatan yang berpusat pada risiko harus diintegrasikan ke dalam NAP, dan adaptasi serta informasi iklim/prakiraan ke dalam strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal.

ASEAN menyambut seruan ini sejak awal, dan mengadopsi *Rencana Kerja untuk Memperkuat Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan tentang Integrasi DRR dan CCA* pada bulan Oktober 2017. *Program Kerja Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER) 2021-2025*, dalam Program Prioritas 2, menawarkan serangkaian keluaran yang difokuskan pada integrasi DRR-CCA, termasuk memperkuat kerja sama dengan para pelaku yang bertanggung jawab atas iklim dan lingkungan, semuanya untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja yang berkelanjutan. Khususnya, Filipina dan Vietnam telah secara efektif menggabungkan peraturan dan pedoman teknis serta kerangka kebijakan dan anggaran nasional untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim³.

2 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Prevention Web (n.d.) Memahami Risiko Bencana: konsep dan prinsip dasar.

3 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Prevention Web (n.d.) Memahami Risiko Bencana, Perubahan iklim sebagai pendorong risiko bencana <https://www.preventionweb.net/understanding-disaster-risk/risk-drivers/climate-change>.

1.3 Apa hubungan antara risiko, kerentanan, dan kapasitas?

Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) jelas menyatakan bahwa “kerentanan adalah salah satu komponen penentu risiko bencana”.⁴

UNDRR Terminology, 2017



Vulnerability is one of the defining components of disaster risk.

Meskipun siapa pun dan di mana pun dapat terkena dampak bencana alam maupun yang disebabkan manusia, “**kerentanan adalah dimensi manusia dari bencana** dan hasil dari berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, politik, dan psikologis yang membentuk kehidupan manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal.”⁵

Selama bencana, perempuan, anak perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi peningkatan risiko ancaman, beban dan dampak kerentanan.⁶ Mengakui kerentanan bersifat khusus gender tidak meniadakan fakta bahwa semua anak berisiko selama bencana. Dalam strategi pengurangan risiko bencana yang komprehensif, sangat penting untuk menangani kebutuhan dan kerentanan semua anak dan masyarakat serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Memahami dan menangani kerentanan sebagai proses yang dinamis dan multidimensi diakui sebagai hal yang penting untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif. Oleh karena itu, strategi dan intervensi CCA dan DDR perlu direncanakan, dirancang, dan ditargetkan dengan pemahaman yang jelas tentang profil kerentanan sosial berbagai kelompok. Meskipun ada berbagai metodologi penilaian kerentanan sosial⁷ metodologi ini mungkin tidak terintegrasi secara sistematis ke dalam keseluruhan proses manajemen risiko iklim dan bencana.

Risiko keseluruhannya, yang merupakan efek gabungan dari tingkat ancaman (bahaya itu sendiri dan paparan terhadapnya), dan tingkat kerentanan terhadapnya, berkurang ketika individu, keluarga, dan komunitas memiliki tingkat kapasitas yang lebih tinggi. **Kapasitas** mencakup faktor perlindungan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Efek peningkatan kapasitas untuk mengurangi risiko ini telah direpresentasikan sebagai Persamaan Risiko Perlindungan:⁸

4 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Prevention Web (n.d.) Memahami Risiko Bencana, Kerentanan.

5 Ibid.

6 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)(2018). Rekomendasi Umum No. 37. pada dimensi terkait gender dari pengurangan risiko bencana dalam konteks perubahan iklim. & UNDRR (2022), Penyandang disabilitas dalam situasi berisiko: studi cakupan pada Pasal 11 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

7 United Nations Development Programme (UNDP) (2017) Alat Penilaian Kerentanan Sosial untuk Perubahan Iklim dan Pemrograman DRR.

8 InterAction (2021), Perlindungan Bagi Masyarakat: Apa Maksud Kita? Pedoman Bagi Pimpinan Senior.



1.4 Latar Belakang

ASEAN merupakan salah satu kawasan paling rentan di dunia, yang rentan terhadap berbagai bencana alam (termasuk yang terkait dengan iklim) dan bencana yang disebabkan oleh manusia (Visi ASEAN 2025 tentang Manajemen Bencana).

Meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana ini telah menyebabkan meningkatnya kerugian ekonomi, meningkatnya angka kematian akibat bencana, dan meningkatnya jumlah penduduk yang terlantar di wilayah tersebut. Selama beberapa tahun mendatang, paparan penduduk terhadap bencana terkait iklim diperkirakan akan meningkat sebesar 7%.⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui bahwa “Tingkat dan besarnya krisis tiga planet, yang meliputi darurat iklim, runtuhnya keanekaragaman hayati dan polusi yang meluas, merupakan ancaman yang mendesak dan sistemik terhadap hak-hak anak secara global” dan Komite Hak-Hak Anak “menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak buruk dari degradasi lingkungan, dengan fokus khusus pada perubahan iklim, pada kenikmatan hak-hak anak”.¹⁰ Menurut Indeks Risiko Iklim Anak-Anak (CCRI) UNICEF, anak-anak ASEAN tinggal di negara-negara yang berisiko ‘Tinggi’ atau ‘Sangat Tinggi’ terhadap dampak bencana dan efek yang disebabkan oleh iklim.¹¹ Mitigasi risiko bencana dan iklim juga merupakan tujuan utama ASEAN, untuk memastikan bahwa kawasan ini dapat mencapai tujuan yang digariskan dalam Kerangka Sendai (Kotak 3) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

9 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) (2023) Memanfaatkan Momen: Menargetkan ketahanan risiko bencana yang transformatif: Laporan bencana Asia-Pasifik. hlm. 22.

10 UN Committee on the Rights of the Child (UNCRC), (2023), Komentar Umum No. 26 tentang hak anak dan lingkungannya dengan fokus khusus pada perubahan iklim.

11 Di 2021 United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengembangkan Children’s Climate Risk Index (CCRI) yang memberikan peringkat negara berdasarkan paparan anak-anak terhadap guncangan iklim dan lingkungan, seperti siklon dan gelombang panas serta kerentanan mereka terhadap guncangan tersebut berdasarkan akses mereka terhadap layanan penting.

Kotak 3. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana

Kerangka Sendai menyediakan tindakan konkret bagi negara-negara anggota untuk melindungi pencapaian pembangunan dari risiko bencana. Kerangka ini didukung oleh Majelis Umum PBB setelah Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana (WCDRR) PBB Ketiga tahun 2015, dan mengadvokasi: *Pengurangan risiko bencana dan kerugian yang substantial pada jiwa, mata pencaharian, dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara*. Kerangka ini mengakui bahwa Negara memiliki peran utama untuk mengurangi risiko bencana, tetapi tanggung jawab tersebut harus dibagi dengan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kerangka Sendai dibangun berdasarkan 4 prioritas utama: Memahami risiko bencana; Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana; Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan; Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER) berfungsi sebagai kebijakan dasar yang memandu Negara-negara Anggota ASEAN dalam memperkuat upaya kolaboratif mereka untuk mengurangi risiko bencana dan menanggapi bencana secara efektif di seluruh kawasan. Program Kerja AADMER 2021-2025 yang menyertainya dan khususnya Program Prioritas Dua Pencegahan dan Mitigasi relevan dengan tenaga kerja layanan sosial. Program ini bertujuan untuk “memperkuat ketahanan masyarakat, kota, infrastruktur, dan ekonomi di ASEAN dengan menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan dan inklusivitas” (Program Kerja AADMER 2021-2025, halaman 42):

- Sub-Prioritas 2.5. Kelompok Rentan dan Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM)
 - » Hasil 2.5.1 Memperkuat mekanisme perlindungan sosial di seluruh kawasan. Hal ini melibatkan pengembangan Pedoman ASEAN tentang Perlindungan Sosial Tanggap Bencana untuk Meningkatkan Ketahanan (Kotak 4)
 - » Hasil 2.5.2 Meningkatkan ketahanan masyarakat di kawasan tersebut
 - » Hasil 2.5.3 Memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan keterlibatan masyarakat sipil dalam inklusi sosial dalam manajemen bencana.

Kotak 4. Layanan perawatan sosial sebagai mekanisme DRR

Pedoman ASEAN tentang Perlindungan Sosial Tanggap Bencana untuk Meningkatkan Ketahanan mengakui bahwa akses ke layanan perawatan sosial dan melibatkan penyediaan pekerjaan sosial, perawatan pribadi, perlindungan atau layanan dukungan sosial kepada anak-anak atau orang dewasa berkontribusi untuk membangun ketahanan rumah tangga..

Meskipun ada kemajuan terkini dalam pengembangan kerangka kebijakan DRR, dalam praktiknya, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan berkelanjutan dalam pelaksanaannya, dalam membangun kemajuan signifikan yang telah dicapai selama dua puluh tahun terakhir dalam manajemen bencana.¹²

Pada tahun 2020, Negara-negara Anggota ASEAN mengadopsi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif (selanjutnya disebut Deklarasi Ha Noi). Deklarasi ini mengakui peran penting pekerjaan sosial dalam mengurangi dampak krisis ekonomi dan sosial, serta meningkatkan akses yang adil bagi masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan.¹³ Peta Jalan untuk Implementasi Deklarasi Ha Noi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif (selanjutnya disebut Peta Jalan) yang menyertainya sejalan dengan kerangka kerja global tentang hak asasi manusia dan menyerukan peningkatan akses terhadap layanan pekerjaan sosial bagi mereka yang membutuhkannya.

1.5 Dampak Bencana

Bencana, khususnya, memiliki dampak yang luas, dengan dampak yang sangat signifikan dan tidak proporsional pada populasi yang rentan. Populasi yang rentan dapat mencakup individu berpenghasilan rendah, etnis minoritas, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, tunawisma, dan mereka yang tinggal di permukiman informal.

¹² Mely Caballero-Anthony, Alistair D. B. Cook dan Jonatan Lassa, (2023), *Manajemen Bencana di Asia Tenggara: 20 Tahun Kemajuan dan Tantangan*, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), NTU.

¹³ Kelompok ini mencakup orang lansia, penyandang disabilitas, pemuda, perempuan, anak-anak dan remaja, pekerja migran dan korban kekerasan, perdagangan manusia, pandemi dan bencana, dan lain sebagainya.

Sejak tahun 1970, Asia dan Pasifik telah mengalami bencana yang mengakibatkan lebih dari 2 juta kematian, yang merupakan hampir 60 persen dari total jumlah kematian akibat bencana global.¹⁴ Asia Selatan dan Asia Barat Daya adalah sub-wilayah yang paling terdampak, dan menyumbang setengah dari jumlah kematian.¹⁵

Dampak bencana yang sangat luas dapat dibagi-bagi lagi menjadi dampak kemanusiaan, sosial ekonomi, kesehatan mental, psikososial, dan lingkungan.

14 UNESCAP (2023) Memanfaatkan Momen: Menargetkan ketahanan risiko bencana yang transformatif: Laporan bencana Asia-Pasifik.

15 Ibid. hlm.8.

Dampak kemanusiaan

Pengungsian: Pengungsian (perpindahan paksa atau tidak sukarela orang-orang yang terkait dengan bencana) adalah salah satu dampak bencana yang paling umum dan langsung, yang diperkirakan akan meningkat akibat perubahan iklim karena peristiwa cuaca ekstrem menjadi lebih sering dan intens. Orang yang harus meninggalkan rumah, terutama ketika kembali tidak memungkinkan untuk waktu yang lama, meningkatkan kebutuhan kemanusiaan dan memaparkan orang-orang pada risiko signifikan lainnya yang terkait dengan pengungsian mereka, termasuk pengungsian sekunder. Populasi yang rentan lebih mungkin mengungsi selama bencana, baik sementara maupun permanen. Mereka mungkin kekurangan sumber daya atau sistem pendukung untuk segera pulih atau menemukan perumahan alternatif.

Antara tahun 2010 dan 2021, lebih dari 225 juta orang di kawasan Asia dan Pasifik mengalami pengungsian akibat bencana alam, yang mewakili lebih dari 78% dari total pengungsi di seluruh dunia.¹⁶ Pada tahun 2021 saja, kombinasi bencana alam dan konflik mengakibatkan lebih dari 2,5 juta (2.522.801) kasus pengungsian internal di kalangan anak-anak di kawasan ASEAN.¹⁷

Pengungsian memengaruhi setiap individu secara unik, dengan pengalaman yang bervariasi bagi pria, wanita, anak laki-laki, anak perempuan, dan individu dengan kemampuan dan identitas yang beragam. Mereka menghadapi risiko yang berbeda dan solusi harus disesuaikan dengan perspektif mereka sendiri. Pengungsian biasanya memperburuk kerentanan yang ada dan melanggengkan ketimpangan sosial.

Ketika anak-anak ditinggal di rumah atau tanpa pengawasan orang dewasa dalam jangka waktu yang lama, mereka akan terpapar berbagai risiko, termasuk meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi. Perubahan rutinitas anak-anak, seperti terganggunya pendidikan mereka, dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional dan pertumbuhan psikososial mereka.¹⁸

Lansia dan penyandang disabilitas mungkin tertinggal saat terjadi bencana. Laporan survei global tahun 2023 tentang penyandang disabilitas dan bencana mencatat bahwa 24% responden melaporkan bahwa mereka mengungsi karena krisis atau bencana dan setengahnya disebabkan oleh konflik bersenjata atau kekerasan yang meluas.¹⁹

Dalam penilaian pasca-Siklon *Amphan* yang dilakukan di Bangladesh pada tahun 2020, mayoritas individu dengan gangguan pendengaran melaporkan tidak dapat mendengar peringatan kesiapsiagaan siklon yang disampaikan melalui pengeras suara.²⁰ Lansia juga mungkin mengalami kesulitan mengakses distribusi makanan atau mungkin tidak dapat memakannya jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

16 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) dan Asian Development Bank (ADB) (2022) Pengungsian Akibat Bencana di Asia dan Pasifik. hlm. 22.

17 UNICEF (n.d.) Anak-anak yang terkena dampak migrasi di negara-negara anggota ASEAN.

18 Ibid. hlm. 68.

19 UNDRR (2023) Laporan Survei Global tentang Penyandang Disabilitas dan Bencana.

20 Ibid. halaman 68.

Perempuan dan anak perempuan yang mengungsi, seringkali menghadapi risiko lebih tinggi dari pengabaian, perlakuan buruk, dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan perdagangan manusia, serta pernikahan dini, dibandingkan dengan individu yang tidak mengungsi atau laki-laki dan anak laki-laki yang mengungsi.²¹

Untuk mencapai target Kerangka Sendai, sangat penting bahwa semua strategi dan intervensi DRR memperhitungkan risiko perpindahan, dampaknya, dan kerentanan khusus masyarakat yang mengungsi dan masyarakat yang terkena dampak pengungsian secara memadai.²²

21 IDMC dan ADB (2022) Pengungsian Akibat Bencana di Asia dan Pasifik.

22 UNDRR (n.d.) Pengungsian Akibat Bencana: Bagaimana Mengurangi Risiko, Mengatasi Dampak dan Memperkuat Ketahanan (pendamping untuk menerapkan Target Kerangka Sendai (E)).



Risiko Kesehatan: Individu yang rentan sering menghadapi peningkatan risiko kesehatan akibat bencana, seperti cedera, penyakit ditularkan melalui air, dan masalah kesehatan mental. Akses ke layanan kesehatan dan bantuan medis mungkin terbatas. Dampak ini terwujud secara langsung melalui cedera fisik, kondisi kesehatan psikologis dan mental, dan penyebaran penyakit menular. Misalnya, di Dhaka, Bangladesh, sebuah penelitian menemukan bahwa peningkatan rawat inap karena demam berdarah dapat dikaitkan dengan banjir atau faktor yang terkait dengan tinggi rendahnya permukaan air sungai.^{23 24}

Setelah terjadi bencana, terganggunya layanan perawatan kesehatan dan rantai pasokan medis membuat individu dengan penyakit kronis dan kebutuhan medis lainnya berada pada risiko yang lebih tinggi.²⁵ Penyandang disabilitas menghadapi risiko tinggi terhadap penyakit dan kematian dalam situasi bencana. Misalnya, setelah gempa bumi dan tsunami tahun 2011 di Jepang, angka kematian di antara penyandang disabilitas dua hingga empat kali lebih tinggi daripada populasi umum.²⁶ Penyandang disabilitas dapat kehilangan akses terhadap obat-obatan penting dan alat bantu, yang meningkatkan ketergantungan mereka pada pengasuh, meningkatkan risiko penyakit dan kondisi sekunder.²⁷

Terganggunya akses terhadap perawatan kesehatan meningkatkan kemungkinan komplikasi bagi ibu dan bayi baru lahir serta potensi peningkatan kematian neonatal dan kejadian kesulitan perkembangan.²⁸ Di India, anak-anak di bawah usia lima tahun yang baru saja mengalami bencana alam menunjukkan peningkatan penyakit akut sebesar 9% hingga 18%, tergantung pada kondisi spesifik yang dinilai (misalnya, diare, demam, masalah pernapasan).²⁹ UNICEF melaporkan bahwa anak-anak yang terpapar gelombang panas rentan terhadap berbagai masalah kesehatan termasuk sengatan panas, diare, berat badan lahir rendah, asma, alergi, penyakit kardiovaskular, dan masalah pernapasan.³⁰ Dampak kesehatan yang ditimbulkan bencana terhadap anak-anak dan pemuda berdampak pada perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif jangka pendek dan jangka panjang. Dibandingkan dengan pria, wanita mengalami insiden kematian dan konsekuensi terkait kesehatan yang lebih besar setelah bencana alam.³¹

23 Hashizume, M., Dewan, A.M., Sunahara, T. *et al.* Variabilitas hidroklimatologi dan penularan demam berdarah di Dhaka, Bangladesh: a time-series study. *BMC Infect Dis* 12, 98 (2012).

24 UNDRR (2019) Laporan Penilaian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana.

25 Minh Tran, (2022), Discussion Brief. Pengurangan risiko bencana dan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik. Lima temuan utama tentang integrasi kebijakan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Stockholm Environment Institute.

26 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (2017) Inklusi Disabilitas dalam Manajemen Risiko Bencana. Praktik dan Peluang yang Menjanjikan untuk Peningkatan Keterlibatan. World Bank Group: Washington DC.

27 UNICEF (2017), *Including children with disabilities in humanitarian action: General* dan UNICEF, *Including children with disabilities in humanitarian action: Kesehatan dan HIV/AIDS*.

28 World Health Organisation (WHO) (2011) Manajemen Risiko Bencana untuk Kesehatan. Kesehatan Anak.

29 Datar, A., Liu, J., Linnemayr, S., & Stecher, C. (2013). Dampak bencana alam terhadap kesehatan anak dan investasi di pedesaan India. *Ilmu Sosial dan Kedokteran*, 76(1), hlm.83–91.

30 UNICEF (2023), Anak-anak Harus Menjadi Inti dari Pengurangan Risiko Bencana dan Aksi Perubahan Iklim.

31 Riyad Fatema S. (2020) Kerentanan terkait kesehatan perempuan di daerah yang terkena bencana alam di Bangladesh: protokol studi metode campuran.

Orang-orang juga dapat mengalami kecacatan akibat bencana dengan prevalensi gangguan fisik, sensorik, dan psikososial yang meningkat secara signifikan. Untuk setiap orang yang terbunuh dalam keadaan darurat, diperkirakan tiga orang menjadi cedera atau mengalami kecacatan.³² Pada gempa bumi Haiti tahun 2010, dari 3 juta orang yang terkena dampak, sekitar 200.000 orang menderita cedera atau mengalami kecacatan.³³

Dampak sosial ekonomi:

Dibandingkan dengan kawasan lain di dunia, Asia dan Pasifik mengalami bagian kerugian ekonomi tertinggi yang disebabkan oleh bencana sebagai persentase PDB.³⁴ Bencana cenderung memperparah kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang sudah ada.³⁵ Dampak sosial-ekonomi terutama terwujud dalam:

Kerawanan Pangan: Bencana dapat mengganggu produksi pertanian, air bersih, pasokan pangan, dan mata pencaharian, yang menyebabkan kerawanan pangan, yang secara tidak proporsional memengaruhi populasi rentan yang sudah berjuang untuk mendapatkan akses ke nutrisi yang memadai. Program Pangan Dunia (WFP) memperkirakan bahwa pada tahun 2022, 7 juta orang tambahan di Asia Pasifik menjadi rawan pangan, yang disebabkan oleh perang di Ukraina, krisis pangan global, dan guncangan iklim.³⁶ Hal ini menandai peningkatan sebanyak 41,5 juta sejak sebelum pandemi, sehingga totalnya 69,1 juta orang di kawasan tersebut menjadi rawan pangan pada akhir tahun 2022.³⁷ Tingginya tingkat malnutrisi, termasuk *stunting* (pengerdilan) dan *wasting* (kurang berat badan), telah mengikis keamanan gizi, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan, di Kamboja dan Republik Demokratik Rakyat Laos sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan.³⁸

Kerugian Ekonomi: Komunitas rentan sering kali memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas dan mungkin bergantung pada mata pencaharian informal atau subsisten. Bencana dapat menghancurkan mata pencaharian ini, melalui hilangnya aset pertanian atau bisnis, tanah atau ternak, gangguan perdagangan dan pasar, inflasi dan pengangguran, dan bahkan runtuhnya seluruh ekonomi lokal. Hasilnya adalah bahwa komunitas rentan yang tidak memiliki bentuk mata pencaharian alternatif, tabungan atau akses ke kredit untuk memulai kembali pertanian atau bisnis sering jatuh lebih jauh ke dalam kemiskinan. Misalnya, di Filipina, dengan menggunakan intensitas cahaya malam sebagai indikator ekonomi, telah ditentukan bahwa badai tropis, rata-rata, menyebabkan penurunan 1,7% dalam aktivitas ekonomi lokal pada tahun terjadinya. Dalam kasus ekstrem, kerugian dapat mencapai 23%. Antara tahun 1990 dan 2020, dampak kumulatif badai di Filipina berjumlah setidaknya \$20 miliar dalam kerugian.³⁹ Di seluruh kawasan Asia Pasifik, pada tahun 2022, 140 bencana perubahan iklim menyebabkan kerugian sebesar \$57 miliar. Selain itu, terdapat kerugian ekonomi yang tidak merata di kawasan tersebut, ketika dampak terbesar dialami oleh negara-negara yang paling tidak berkembang.⁴⁰ Dengan latar belakang ini, populasi termiskin dan paling rentan mengadopsi strategi penanggulangan negatif.⁴¹

32 UNICEF (2013), Lembar Fakta Anak dan Remaja Penyandang Disabilitas.

33 Centre for Disaster Philanthropy (CDP) (n.d.) Penyandang Disabilitas.

34 UNESCAP (2023) Memanfaatkan Momen: Menargetkan ketahanan risiko bencana yang transformatif: Laporan bencana Asia-Pasifik.

35 Global Social Service Workforce Alliance (GSSWA) (2022), 'Kondisi Tenaga Kerja Layanan Sosial 2022: Peran Penting Tenaga Sosial dalam Konteks Kemanusiaan'.

36 World Food Programme (WFP), (2023) Krisis Pangan Global: Dampak pada Kawasan Asia Pasifik. Isu-isu Utama untuk Kantor Negara WFP.

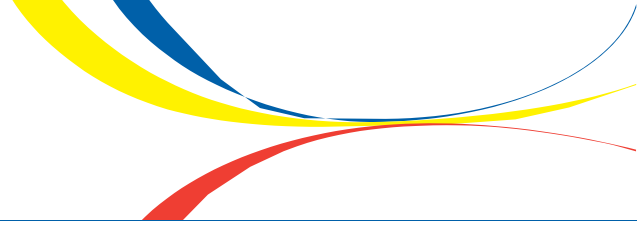
37 Ibid.

38 ADB, (2020) Indikator Utama untuk Asia dan Pasifik 2021.

39 ADB, (2021), Ketahanan Bencana di Asia. Suplemen Khusus Perjalanan Asia Menuju Kemakmuran: Kebijakan, Pasar, dan Teknologi Selama 50 Tahun. Asian Development Bank: Manila.

40 UNESCAP, (2023) Memanfaatkan Momen: Menargetkan ketahanan risiko bencana yang transformatif: Laporan bencana Asia-Pasifik.

41 World Bank, Shock Waves: Mengelola Dampak Perubahan Iklim terhadap Kemiskinan [EN/FR/ES](2015).



Gangguan Pendidikan: Anak-anak dari populasi rentan lebih mungkin mengalami gangguan pendidikan akibat bencana, yang dapat berdampak jangka panjang pada peluang dan kesejahteraan masa depan mereka. Misalnya, kerugian ekonomi dapat menyebabkan berkurangnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan karena keluarga mengadopsi strategi penanganan negatif. Anak-anak yang menjadi yatim piatu setelah tsunami Indonesia tahun 2004 menyelesaikan lebih sedikit tahun sekolah karena trauma atau mengambil alih tanggung jawab orang tua.⁴² Krisis pembelajaran akibat dari pandemi COVID-19 dan efek jangka panjangnya belum sepenuhnya dipahami, namun setidaknya 463 juta anak di seluruh dunia tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh; dan antara Maret 2020 dan September 2021, hampir 77 juta anak di 11 negara kehilangan hampir semua pembelajaran tatap muka, dengan Bangladesh dan Filipina menyumbang 80% dari pelajar yang terkena dampak ini.⁴³ Di 59% negara Asia Timur dan Pasifik yang disurvei, pemerintah belum mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan memfasilitasi pembelajaran bagi anak-anak penyandang disabilitas selama pandemi.⁴⁴ Jumlah anak perempuan di daerah yang terkena dampak krisis yang tidak bersekolah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata global dan lebih dari seperlima (21%) anak perempuan usia sekolah dasar di negara-negara yang terkena dampak krisis tidak bersekolah, dibandingkan dengan 15% anak laki-laki.⁴⁵

Ketidaksetaraan Gender: Bencana merupakan pengalaman yang sangat bergantung gender. Ketidaksetaraan gender dapat diperburuk, dengan perempuan dan anak perempuan menghadapi tantangan unik, seperti meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dan akses tidak setara ke sumber daya dan pengambilan keputusan. Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional terkena dampak bencana alam, seperti tsunami, badai, gempa bumi, dan banjir dan mereka menghadapi risiko kekerasan dan eksploitasi yang lebih tinggi dibanding laki-laki dan anak laki-laki karena terganggunya perumahan dan sistem pendukung tradisional, terbatasnya akses ke layanan penting, dan berbagai hambatan struktural dan sosial dalam memperoleh makanan, barang bantuan, perlengkapan, dan fasilitas sanitasi.⁴⁶ Perempuan dan anak perempuan sering tidak memiliki akses ke sumber daya, keterampilan, dan informasi kesiapsiagaan bencana yang dibutuhkan untuk ketahanan dan peningkatan mata pencaharian. Misalnya, 77% korban Tsunami Indonesia tahun 2004 adalah perempuan dan anak perempuan, dan pada gempa bumi Nepal tahun 2015, 55% adalah perempuan dan anak perempuan. Lebih dari 80% dari mereka yang hidup dengan kurang dari \$2 sehari di Asia adalah perempuan, yang membatasi kemampuan mereka untuk menabung untuk bencana. Selain itu, perempuan di Asia memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang minimal, yang membatasi pengaruh mereka dalam proses DRR.⁴⁷ Orang-orang dengan identitas gender dan seksual yang beragam mengalami kerentanan unik yang terkait dengan marginalisasi yang sudah ada sebelumnya dan kebutuhan mereka sering diabaikan dalam strategi respons krisis.⁴⁸

42 Cas, A.G., Frankenberg, E., Suriastini, W. *et al.* Dampak Kematian Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak: Bukti dari Tsunami Samudra Hindia. *Demography* **51**, hlm. 437–457 (2014).

43 UNICEF, (2021), Education Disrupted. Tahun kedua pandemi COVID-19 dan penutupan sekolah. 11 negara tersebut adalah Bangladesh, Meksiko, Filipina, Myanmar, Irak, Venezuela, Arab Saudi, Yordania, Honduras, Panama, dan Kuwait.

44 UNICEF, (2020), Children with Disabilities: Memastikan keterlibatan mereka dalam strategi respons COVID-19 dan pembuatan bukti.

45 Inter-agency Network for Education in Emergencies INEE (2021) Mind the Gap: Keadaan Pendidikan Anak Perempuan dalam Krisis dan Konflik.

46 World Bank (2015). Global Women's Institute dan IDB, Ringkasan Manajemen Risiko Bencana tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.

47 UN Women (2022). Memastikan Pengurangan Risiko Bencana yang Responsif Gender. Praktik Baik dari ASEAN.

48 Haworth, B.T. (2021). Belajar dari pengalaman LGBTIQ+ di Inggris terkait COVID-19 untuk krisis di masa mendatang. Seri Ringkasan Kebijakan HCRI, 01/21.



Penting juga untuk mengenali dampak norma sosial maskulinitas, termasuk hipermaskulinitas,⁴⁹ pada pria dan anak laki-laki selama bencana alam, situasi konflik, dan situasi kemanusiaan lainnya, termasuk sebagai akibat dari harapan untuk mengambil peran sebagai pembela, pelindung, dan pencari nafkah bagi keluarga dan komunitas mereka. Akibatnya, mereka mungkin memiliki, atau merasa, sedikit atau tidak memiliki izin, waktu, atau ruang untuk mengekspresikan ketakutan dan kecemasan mereka atau untuk menerima dukungan psikososial setelah trauma. Anak laki-laki remaja mungkin tidak merasa bahwa ruang yang ramah anak cocok untuk mereka, atau mungkin tidak ingin terlihat memanfaatkan bentuk dukungan tersebut. Mereka juga dapat sangat rentan terhadap radikalisasi, dan anak laki-laki berisiko tinggi dimobilisasi tidak hanya untuk membela komunitas mereka tetapi juga untuk tindakan agresi atau pembalasan, baik fisik maupun seksual, termasuk melalui keterlibatan dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata; meskipun perlu dicatat bahwa anak perempuan juga berisiko bergaul dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, termasuk melalui eksploitasi seksual.⁵⁰

Akses Terbatas terhadap Informasi dan Sumber Daya: Populasi rentan mungkin memiliki akses terbatas ke sistem peringatan dini, layanan darurat, dan sumber daya bantuan, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk mempersiapkan diri, mengatasi, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana. Terdapat kesenjangan besar dalam adopsi dan penggunaan digital oleh perempuan dan anak perempuan dibanding laki-laki dan anak laki-laki.⁵¹ Secara global, perempuan 8% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki telepon seluler dibanding laki-laki dan angka ini meningkat menjadi 23% di Asia Selatan. Keterbatasan akses ke teknologi digital tidak hanya membatasi akses terhadap informasi tetapi juga mencegah perempuan untuk mengambil tempat mereka di tempat kerja yang secara teknis menarik, setelah terjadinya bencana dan pengungsian.⁵² Selama Siklon Tropis Pam di Vanuatu, 74% perempuan dan 50% laki-laki penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam mengakses pusat evakuasi karena informasi kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang berbeda-beda.⁵³ Pusat Filantropi Bencana merekomendasikan agar **semua informasi kesiapsiagaan darurat atau bencana ditinjau dengan mempertimbangkan aksesibilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas, orang dewasa dan anak-anak dengan tingkat literasi yang berbeda, dan migran yang mungkin tidak familiar dengan bahasa setempat.**

Meningkatnya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, serta praktik-praktik yang merugikan: Berbagai penelitian mendokumentasikan peningkatan prevalensi dan keparahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan seksual dan fisik, di masyarakat yang mengalami bencana. Bencana meningkatkan tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis pada keluarga, mengikis mata pencaharian, melemahkan sistem pendukung masyarakat dan keluarga yang berkontribusi pada peningkatan kemungkinan mengalami kekerasan dan eksploitasi (termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual online), serta adopsi mekanisme penanganan negatif dan praktik-praktik yang merugikan (termasuk pekerja anak dan pernikahan dini).

49 Brian Ferguson, R (2021) Masculinity and War. Antropologi Terkini, Volume 62, Edisi S23: Menuju Pemahaman Antropologis tentang Maskulinitas, Kejantanan, dan Kekerasan.

50 The Alliance For Child Protection In Humanitarian Action, Info dan sumber daya selengkapnya tentang Children Association with Armed Forces and Armed Groups (CAAFAG).

51 UNICEF (n.d.) Apa yang kita ketahui tentang kesenjangan digital gender untuk anak perempuan: Tinjauan pustaka.

52 Ibid.

53 Overseas Development Institute- Humanitarian Practice Network (ODI-HPN) Majalah Humanitarian Exchange No. 78 (2020) Inklusi Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

Dampak terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial

Ada bukti kuat bahwa bencana menyebabkan tekanan psikososial di seluruh populasi, dan bahwa perubahan iklim dapat secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial. Paparan terkait perubahan iklim telah dikaitkan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas kesehatan mental dan erosi proses sosial dan budaya yang positif serta kesejahteraan. Trauma adalah diagnosis klinis dan dialami oleh sejumlah kecil populasi yang terkena dampak. Biasanya, orang akan memiliki reaksi jangka pendek yang kuat yang menghilang saat kebutuhan dasar terpenuhi dan ada kembalinya fungsi normal. Namun, populasi yang rentan mungkin mengalami masalah kesehatan mental yang berlangsung lama sebagai akibat dari kehilangan, pengungsian, dan gangguan jaringan sosial terkait bencana. Layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial sering kali terbatas bahkan dalam situasi non-krisis, dan keadaan darurat dapat semakin mengganggu ketersediaan layanan ini dan kemampuan orang untuk menjangkanya. Individu dengan kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya rentan terhadap kekambuhan atau penurunan, sering menghadapi stigma dan diskriminasi, dan memerlukan akses berkelanjutan ke perawatan dan perlindungan.⁵⁴ Dalam kasus anak-anak, kondisi yang buruk selama keadaan darurat dapat mengganggu perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik mereka, yang mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi masa depan mereka.⁵⁵ Secara global, satu dari lima orang yang terkena dampak konflik diperkirakan memiliki kondisi kesehatan mental.⁵⁶

Dampak lingkungan

Perubahan iklim dan bencana yang disebabkan iklim mempunyai serangkaian dampak lingkungan, termasuk pada i) ekosistem dan keanekaragaman hayati (misalnya gangguan habitat yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies, atau pergeseran dalam distribusi spesies yang dapat menyebabkan persaingan untuk sumber daya), ii) degradasi tanah, erosi dan penggurunan (pada gilirannya mempengaruhi pertanian, stabilitas lahan dan mata pencaharian manusia) iii) sumber daya air, termasuk banjir di wilayah pesisir, salinitas sumber air tawar, hilangnya lahan, pengasaman laut iv) polusi udara, kebakaran hutan.

Kotak 5: Perubahan iklim, kerentanan, dan ketidaksetaraan berinteraksi dalam lingkaran setan

Kelompok yang kurang beruntung menderita dampak buruk perubahan iklim secara tidak proporsional, yang mengurangi kemampuan mereka untuk mengurangi paparan, mencegah potensi efek, mengatasi dan memulihkan diri dari dampak iklim dan bencana, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar.

54 The Mental Health and Psychosocial Support Minimum Service Package (MHPSS MSP).

55 Ibid.

56 Charlson, F. et al. (2019). Perkiraan prevalensi gangguan mental WHO terbaru di lingkungan konflik: tinjauan sistematis dan meta-analisis. *The Lancet* 394 (10194), hlm. 240-248.

2. Peran penting tenaga kerja layanan sosial dalam melibatkan masyarakat dalam DRR dan CCA

Pekerja sosial dan pekerja layanan sosial lainnya memiliki peran penting dalam mengurangi kerentanan dan paparan terhadap bahaya serta membangun ketahanan masyarakat dan keluarga sebelum, selama, dan setelah bencana. Peran ini meliputi:

2.1 Keterlibatan Masyarakat dan Penyediaan Informasi

Pekerja sosial dan tenaga kerja layanan sosial lainnya harus memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk menilai berbagai kebutuhan masyarakat yang berisiko atau terdampak sambil mengatasi kerentanan mereka. Keterlibatan masyarakat tersebut, termasuk mengidentifikasi, melibatkan, dan memberdayakan para pemimpin masyarakat, pemimpin adat dan suku, serta relawan, dapat membantu masyarakat membangun kapasitas yang telah ada sebelumnya dan membangun kesiapan dan ketahanan mengelola guncangan dan pemicu stres. Melalui pendekatan keterlibatan masyarakat, SSW memberdayakan kelompok dan jaringan sosial dengan mengidentifikasi kekuatan dan meningkatkan kapasitas serta mendukung pembangunan lokal dan kepemilikan solusi berbasis masyarakat.

SSW memainkan peran penting dalam menyediakan informasi penting kepada anggota masyarakat tentang risiko bencana, potensi bahaya, dan pentingnya kesiapsiagaan (Kotak 2). Melalui lokakarya, sesi pelatihan, dan kampanye kesadaran yang inklusif dan mudah diakses, SSW menyediakan informasi dan dukungan yang memberdayakan individu dan masyarakat untuk memahami risiko yang mereka hadapi dan mengambil langkah proaktif untuk mengurangnya (termasuk melalui rencana kesiapsiagaan dan respons yang dibentuk dan dimiliki secara lokal).

Khususnya, dengan melibatkan berbagai kelompok dan populasi yang paling terpinggirkan dalam masyarakat, SSW dapat menemukan saluran yang paling tepercaya dan suara yang disukai untuk berbagi informasi penyelamatan jiwa yang kontekstual dan tepat waktu. Selain itu, SSW dapat memfasilitasi peluang dan jalan yang bermakna bagi orang-orang yang rentan dan terpinggirkan untuk menyampaikan keprihatinan dan persyaratan mereka kepada otoritas terkait. Dengan meningkatkan kesadaran risiko bencana dan cara mengurangnya, dan dengan melibatkan berbagai perwakilan masyarakat, pemimpin adat, berbagai kelompok yang terpinggirkan, dan khususnya anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, dalam perencanaan dan kesiapsiagaan bersama, SSW meningkatkan kesiapan keseluruhan masyarakat dan rasa saling percaya, sekaligus menumbuhkan budaya ketahanan.

SSW melibatkan masyarakat dalam persiapan tanggap bencana alam berdasarkan analisis risiko, perencanaan kontinjensi, penimbunan peralatan dan perlengkapan, evakuasi dan komunikasi masyarakat; terkait dengan sistem peringatan dini. Informasi yang diberikan harus diutamakan pada pencegahan dan keterampilan penanganan saat bencana alam terjadi, mendukung populasi rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehidupan, menciptakan peluang sehingga mereka dapat mengakses sumber daya yang diperlukan.

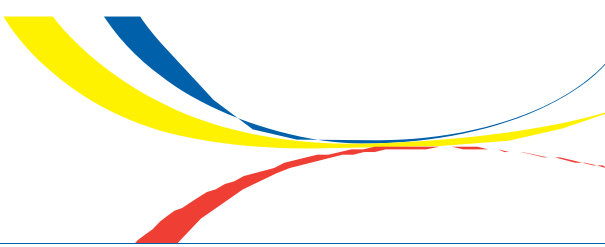
Pendekatan seluruh masyarakat terhadap DDR-CCA dimulai dengan keterlibatan dan konsultasi dengan mereka yang menghadapi risiko bencana secara langsung, mengakui bahwa mereka mempunyai kapasitas untuk berkontribusi pada ketahanan mereka sendiri.⁵⁷

Kotak 2. Melibatkan Anak-anak dan Pemuda di Garis Depan DDR dan Ketahanan

Mewakili lebih dari separuh populasi dunia, anak-anak dan pemuda di bawah usia 30 tahun akan memperoleh manfaat paling besar dari pengurangan risiko dan dampak bencana. Sering kali yang paling terkena dampak pertama dan paling parah ketika bencana terjadi, anak-anak dan pemuda mengalami dampak yang terlalu besar terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, kebutuhan gizi, akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, paparan kekerasan, serta banyak efek samping lainnya yang membatasi. Anak-anak dan pemuda yang hidup dalam kemiskinan dan situasi rentan lainnya menghadapi risiko yang lebih besar, terutama karena perubahan iklim meningkatkan besarnya dan jumlah bencana di seluruh dunia. Memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, bahwa mereka terlibat secara bermakna dan diberikan alat, pengetahuan, sumber daya, dan peluang untuk berpartisipasi dan memimpin, dan bahwa kontribusi mereka terintegrasi ke dalam upaya pengurangan risiko bencana dan iklim sangat penting untuk menegakkan hak-hak mereka.

Pada tahun 2020, UNDRR menerbitkan Panduan Kata-kata Menjadi Aksi tentang Melibatkan Anak-anak dan Pemuda dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Membangun Ketahanan yang menawarkan akses ke keahlian global, komunitas praktik, dan jaringan praktisi dengan saran khusus tentang cara mendukung dan melibatkan anak-anak dan pemuda.

⁵⁷ Sehubungan dengan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme 2021-2025 yang mendorong ASEAN untuk menanamkan pendekatan menyeluruh terhadap manajemen bencana yang tidak meninggalkan siapa pun.



2.2 Dukungan untuk populasi dan mata pencaharian yang rentan

Selama bencana, segmen populasi tertentu lebih rentan (karena faktor-faktor seperti usia, gender, disabilitas, status minoritas, dan status sosial ekonomi), terpapar, dan memiliki kapasitas terbatas untuk mengatasi, beradaptasi, dan pulih. Tenaga kerja layanan sosial berperan dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan ini, menilai, dan menangani kebutuhan serta kapasitas mereka. Mengingat dampak ekonomi bencana dan perubahan iklim yang sering kali mendalam dan berkelanjutan, termasuk hilangnya pekerjaan, aset, dan mata pencaharian, tenaga kerja layanan sosial dapat memainkan peran penting dalam mencegah atau mengurangi dampak ekonomi terburuk, dan kemudian dalam mendukung pemulihan ekonomi, melalui koordinasi dan penerapan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan tanggap guncangan.

Dalam sistem perlindungan sosial, sementara administrator perlindungan sosial mendaftarkan mereka yang memenuhi syarat untuk menerima transfer tunai dan mengatur serta memantau pembayaran, mereka perlu bekerja sama erat dengan pekerja sosial dan pihak lain dalam SSW. SSW, melalui penjangkauan masyarakat dan kunjungan rumah, berada dalam tempat yang tepat untuk memastikan bahwa manfaat transfer tunai diperluas dan dipertahankan melalui pendampingan layanan berupa nasihat, dukungan, identifikasi kebutuhan tambahan dan rujukan, dan, jika perlu, manajemen kasus (menilai kebutuhan dan risiko, mengoordinasikan rujukan dan menyediakan dukungan tindak lanjut atau perlindungan untuk kebutuhan yang lebih kompleks).⁵⁸

Melalui penggunaan pendekatan inklusif dan preventif, SSW dapat memastikan bahwa kelompok rentan didukung untuk membentuk perspektif dan keputusan penting yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam rencana kesiapsiagaan dan tanggap bencana. SSW dapat terlibat dalam pembuatan dan penerapan rencana khusus untuk memenuhi persyaratan unik kelompok ini, seperti memobilisasi dan mengoordinasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan langsung dan jangka panjang, memastikan tempat penampungan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, menyediakan bantuan medis bagi individu dengan kebutuhan khusus. Dengan memprioritaskan dan menangani kebutuhan populasi rentan melalui pendekatan penjangkauan masyarakat dan manajemen kasus, termasuk mengoordinasikan layanan untuk menangani kesehatan dan pendidikan mereka dan mengintegrasikannya dengan layanan untuk menangani kebutuhan kesejahteraan sosial mereka, pekerja layanan sosial dapat berkontribusi pada tanggap bencana yang lebih adil dan efektif.

SSW juga berperan dalam mengidentifikasi kerentanan di dalam individu dan masyarakat. Kerentanan yang ada dalam individu sering disebut sebagai kemiskinan, penyakit, dan pendapatan rendah. Ketiadaan jaringan penanggulangan bencana juga menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan bagi anggota masyarakat pasca kejadian.

⁵⁸ Pedoman Regional ASEAN tentang Penguatan Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Layanan Sosial yang Lebih Luas dalam Perlindungan Sosial, (2023).

Kotak 3. Dukungan Populasi Rentan

Terapis okupasi di Bangladesh yang bekerja di daerah rawan banjir, siklon, dan gempa bumi telah membantu pelatihan prabencana dan mengembangkan respons inklusif bagi penyandang disabilitas seperti tempat penampungan yang mudah diakses. Pascabencana, mereka telah mendukung konseling, rehabilitasi, pelatihan kejuruan, modifikasi rumah, dan pembangunan kembali.⁵⁹

2.3 Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (MHPSS)

Individu dan masyarakat yang terdampak oleh peristiwa berbahaya, termasuk bencana, atau antisipasi terhadap peristiwa tersebut, bereaksi dengan berbagai cara, dari reaksi stres yang relatif sementara dan ringan hingga tekanan signifikan dan gangguan psikososial. Untungnya, sebagian besar reaksi stres cenderung cepat teratasi saat individu mampu mengakses dukungan sosial dan membangun kembali jaringan komunitas. Namun, faktor-faktor perlindungan ini mungkin terbatas atau melemah selama keadaan darurat dan beberapa individu mungkin mengalami kondisi kesehatan mental yang baru atau memburuk.⁶⁰ Bencana dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang serius terhadap individu dan masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi masyarakat yang hidup dalam situasi rentan seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan atau anggota kelompok berisiko (misalnya penyandang disabilitas atau orang dengan kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, perempuan dan anak-anak, migran atau orang terlanjar).

Pekerja layanan sosial yang terlatih dalam penyediaan dukungan kesehatan mental khusus dapat memberikan dukungan psikososial penting bagi para penyintas dengan menawarkan pertolongan pertama psikologis. Jika tersedia, konseling, terapi kelompok, dan layanan kesehatan mental juga dapat diberikan oleh pekerja sosial spesialis dan konselor dengan pelatihan yang sesuai. Sementara paraprofesional dapat diperlengkapi untuk memberikan pertolongan pertama psikologis, pekerja sosial yang berkualifikasi dapat menawarkan dukungan psikologis yang lebih mendalam. Mereka dapat membantu individu mengatasi trauma, kesedihan, kecemasan, dan tantangan emosional lainnya yang muncul dari bencana, selain mendukung rujukan untuk layanan lain berdasarkan kebutuhan individu, termasuk bagi para penyintas kekerasan. Dukungan Kesehatan Mental dan Psikologis (MHPPS) harus inklusif dan dapat diakses dalam desain dan penyediaan, termasuk peka terhadap gender dan usia, beradaptasi secara budaya, dan inklusif dengan disabilitas.⁶¹

Dengan menangani kesejahteraan mental populasi yang terkena bencana, pekerja layanan sosial berkontribusi pada pemulihan dan ketahanan jangka panjang masyarakat, mengurangi risiko tekanan psikologis yang berlangsung lama. Pekerja sosial juga dapat mendukung penguatan sistem kesehatan mental yang dapat bertahan dalam keadaan darurat, dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaannya, termasuk melalui memastikan akses, dan meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dengan kondisi kesehatan mental yang ada tentang bagaimana mereka dapat mengakses dukungan dan layanan dalam situasi bencana.⁶²

Selain itu, untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak, SSW melakukan pengumpulan informasi tambahan, terutama yang terkait dengan kesehatan sehingga bantuan medis diberikan dengan cepat dan efektif, dan merencanakan prioritas dukungan berdasarkan situasi dan kebutuhan individu dan masyarakat yang terkena dampak.

59 Habib, M., Uddin, J., Rahman, S. U., Jahan, N., & Akter, S. (2013). Peran terapi okupasi dalam manajemen bencana di Bangladesh. *Buletin Federasi Terapis Okupasi Dunia*, 68(1), hlm. 33–37.

60 Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2021) Menghubungkan Disaster Risk Reduction (DRR) dan Mental Health And Psychosocial Support (MHPSS), Alat Praktis, Pendekatan, dan Studi Kasus.

61 IASC (2024) Catatan Informasi tentang Disabilitas dan Inklusi dalam MHPSS.

62 IASC (2021) Menghubungkan Disaster Risk Reduction (DRR) dan Mental Health And Psychosocial Support (MHPSS), Alat Praktis, Pendekatan, dan Studi Kasus.

2.4 Mencegah, mengurangi dan menanggapi risiko bahaya khususnya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta praktik-praktik yang merugikan

Baik keadaan darurat yang terjadi secara perlahan maupun tiba-tiba, serta migrasi dan relokasi massal akibat bencana dan perubahan iklim, meningkatkan risiko kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender), pelecehan, dan eksploitasi (online dan offline) serta perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan perempuan, dan perpisahan keluarga.

Peran SSW dalam mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menanggapi risiko-risiko yang meningkat ini sangat penting. SSW dapat memainkan peran ini melalui pendekatan preventif dan responsifnya. Dalam pekerjaan preventifnya, SSW sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga untuk menghadapi guncangan dan mencegah bahaya. Dalam pekerjaan responsifnya, SSW menggunakan pendekatan **manajemen kasus** untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan individu dan keluarga, kemudian memberikan, memantau, dan mengoordinasikan layanan dukungan, dan mengoordinasikan rujukan kasus ke penyedia layanan lainnya.

SSW merupakan pemangku kepentingan utama dalam memastikan hak, keselamatan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat yang rentan, khususnya dengan mendorong langkah-langkah mitigasi risiko di semua fase perpindahan, migrasi yang disebabkan iklim, dan proses relokasi. Dengan menerapkan pendekatan berpusat pada masyarakat, multi-sektoral, berwawasan risiko, dan inklusif, SSW dapat terlibat dalam kesiapsiagaan nasional, sub-nasional, dan lokal dan/atau rencana evakuasi dan relokasi dan/atau mendorong tindakan antisipatif berdasarkan penilaian kerentanan yang berwawasan risiko atau sistem waspada peringatan dini multi-bahaya. Fungsi utama dalam proses ini meliputi:

- Memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan. SSW khususnya berkontribusi pada penyediaan informasi yang akurat, sesuai konteks, dan tepat waktu tentang risiko (rute migrasi yang tidak aman, perdagangan manusia, pengaturan ketenagakerjaan yang eksploitatif, kekerasan berbasis gender, dan praktik merugikan lainnya seperti perkawinan anak) dan tentang layanan yang tersedia, ruang/area/narasumber aman, titik akses yang ditunjuk untuk mekanisme pengaduan/umpan balik. Dalam melakukannya, SSW memiliki peran kunci untuk memastikan informasi tersebut dapat diakses oleh anak-anak dan penyandang disabilitas, termasuk melalui penggunaan berbagai format (misalnya, audio, visual).
- Mencegah pemisahan keluarga dan mengurangi risiko terkait melalui langkah-langkah kesiapsiagaan yang tepat; dan mengamankan pergerakan kelompok keluarga selama evakuasi.
- Memastikan jalur evakuasi, tempat penampungan sementara dan pemukiman darurat serta pengaturan berbasis masyarakat yang responsif terhadap usia dan gender serta inklusif terhadap disabilitas, termasuk ruang dan kamar yang ramah anak untuk pasangan, dan mengakomodasi kebutuhan ibu hamil dan menyusui. SSW dapat memainkan peran kunci dalam membantu merencanakan lokasi, desain dan pengaturan pusat evakuasi, dan tempat penampungan atau kamp pengungsian, baik pusat/tempat penampungan permanen yang telah diposisikan sebelumnya maupun untuk pusat/tempat penampungan sementara yang dibuat sebagai respons terhadap bencana.

- Memastikan dan memfasilitasi akses -- melalui manajemen kasus dan sistem rujukan antar-sektoral -- ke layanan perlindungan anak, layanan kekerasan seksual dan berbasis gender, layanan pendidikan, layanan kesehatan (termasuk layanan kesehatan reproduksi untuk anak perempuan dan perempuan), layanan dan kegiatan MHPSS, dan perlindungan sosial. Secara khusus, layanan pencatatan sipil dan akta kelahiran sangat penting untuk mencegah/menangani keadaan tanpa kewarganegaraan dan deprivasi serta hambatan yang berkorelasi.
- Memastikan layanan, sumber daya dan bantuan tersedia dan diberikan tanpa perlakuan diskriminatif, menegakkan hak-hak kelompok terpinggirkan di berbagai tahap pergerakan mereka, yang dapat ditentang oleh bentuk-bentuk diskriminasi sistemik dan narasi diskriminatif (termasuk yang berdasarkan pada identitas Pribumi, agama, etnis dan gender). “Bias sadar dan tidak sadar dalam perancangan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sering kali membuat kebutuhan populasi migran, termasuk anak-anak, tidak terlihat dan terabaikan.”⁶³
- Memfasilitasi kesadaran dan partisipasi individu dan masyarakat rentan dalam rangka:
 - i) memastikan mereka berkontribusi secara langsung dan bermakna terhadap rencana relokasi dan evakuasi dan
 - ii) memungkinkan mereka untuk membuat pilihan dan keputusan sukarela dan berdasarkan informasi dalam skenario mobilitas manusia.
- Mengadvokasi, membantu mengembangkan dan menerapkan kebijakan perlindungan, yang pada awalnya berdasarkan pada prinsip tidak melakukan hal yang merugikan, dan untuk memastikan pencegahan, identifikasi dan tanggapan tepat waktu terhadap segala bentuk kerugian, penyalahgunaan atau eksploitasi dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh tenaga kerja layanan sosial sendiri atau orang lain yang bekerja dengan mereka, terhadap anak-anak, keluarga atau individu rentan yang terkena dampak bencana atau perubahan iklim.

63 UNICEF (2022) Prinsip Panduan bagi Anak-anak yang Berpindah-pindah dalam Konteks Perubahan Iklim.

2.5 Interkoneksi antara strategi DRR-CCA dan penguatan SSW

Dalam banyak konteks, SSW mungkin bukan mitra tradisional atau terlibat aktif dalam strategi dan upaya DRR-CCA yang dipimpin oleh lembaga penanggulangan bencana dan iklim nasional dan sub-nasional. Namun, secara de facto, SSW adalah mitra strategis dan pemangku kepentingan untuk memastikan proses DRR-CCA yang efektif, inklusif, berwawasan risiko, responsif gender dan usia. Memang, dengan fungsi dan jangkauan multi-sektoralnya, serta fokusnya pada pengurangan kerentanan dan pembangunan ketahanan dan atribut penanggap pertama, SSW diposisikan secara unik untuk:

- i) Menawarkan keahlian kerja sosial, data terurai dan wawasan tentang kebutuhan, persepsi dan kapasitas orang-orang yang secara tidak proporsional terkena dampak bencana, dan, dengan keahlian ini, untuk menginformasikan perencanaan dan tindakan antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim, termasuk dalam mengidentifikasi komunitas dan lokasi yang paling mungkin terkena dampak untuk menginformasikan keputusan tentang perencanaan perkotaan, dan lokasi jalur evakuasi dan fasilitas tempat penampungan;⁶⁴
- ii) Memfasilitasi akses, pertukaran dan keterlibatan dengan komunitas rentan terhadap risiko (termasuk struktur berbasis komunitas, kelompok rentan, anak-anak dan pemuda);
- iii) Memfasilitasi sinergi multisektoral dan kolaborasi lintas sektoral⁶⁵, serta meningkatkan keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Organisasi untuk penyandang disabilitas (OPD) dalam pelayanan sosial;
- iv) Melaksanakan atau memungkinkan inisiatif pengurangan risiko bencana dan aksi iklim yang dipimpin masyarakat;
- v) Secara langsung menyediakan dan/atau memfasilitasi akses terhadap layanan perawatan, perlindungan dan dukungan penting sebelum, selama dan setelah bencana.

Pada gilirannya, sistem layanan sosial (termasuk sistem kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan peradilan) harus berinvestasi dan meningkatkan adaptasi ketahanan bencana dan iklim. Khususnya, hal ini berarti perencanaan, pengembangan, dan dukungan bagi tenaga kerja layanan sosial agar siap, berdaya (termasuk mampu melakukan tindakan antisipatif) dan tangkas untuk memastikan keberlanjutan pekerjaan sosial dan layanan sosial yang penting bagi populasi yang terdampak dan rentan dalam konteks bencana.

2.6 Pengembangan Kebijakan

SSW terlibat dalam penilaian risiko bagi kelompok rentan di masyarakat dan komunitas berisiko tinggi; mengidentifikasi faktor manusia dan sumber daya yang menyebabkan kurangnya ketahanan terhadap kemungkinan konsekuensi perubahan iklim; dan mengusulkan solusi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan termasuk orang, sumber daya dan dukungan dari Pemerintah.

64 The Sendai Framework menyerukan “perhatian khusus terhadap orang-orang yang terkena dampak bencana secara tidak proporsional, terutama mereka yang paling miskin”, UNISDR, ‘Sendai Framework’ (n 11) para 19(d).

65 Deklarasi Hanoi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial Menuju Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif, Komitmen 4, berbunyi: “Meningkatkan koordinasi antar lembaga di tingkat nasional, dan kolaborasi lintas sektoral di tingkat ASEAN, antara kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keadilan, ketenagakerjaan, pengembangan masyarakat, keuangan, pengurangan risiko bencana dan manajemen untuk secara eksplisit merujuk pekerjaan sosial dalam mekanisme, platform, dan peraturan yang relevan”.

3. Peran dan tindakan utama tenaga kerja layanan sosial untuk melibatkan anak-anak dan pemuda, dan memastikan DRR yang berpusatkan anak

Pekerja sosial, dan pekerja layanan sosial lainnya, dapat membantu membangun masyarakat yang tahan bencana dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama yang paling rentan, dipersiapkan dan didukung secara memadai selama masa krisis. Khususnya, terkait dengan anak-anak dan pemuda, Kerangka Sendai menyatakan dalam bagian 36 (ii): “Anak-anak dan pemuda adalah agen perubahan dan harus diberi ruang dan modalitas untuk berkontribusi pada pengurangan risiko bencana”. Anak-anak adalah pihak yang paling tidak bertanggung jawab terhadap iklim, namun mereka akan menanggung beban terbesar dari dampaknya⁶⁶. Melibatkan anak-anak dalam upaya DRR penting untuk menegakkan hak-hak mereka dan karena manfaat praktis yang diberikannya kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat lebih luas. Melibatkan anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana secara keseluruhan sambil memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota masyarakat yang paling rentan. Anak-anak, seperti orang dewasa, sering tinggal di daerah atau komunitas yang berisiko atau berbahaya, seperti bahaya lingkungan atau tantangan sosial. Terlepas dari usia mereka, anak-anak terampil dalam menavigasi kerentanan ini, yang berarti mereka memiliki tingkat adaptasi dan kesadaran tertentu dalam menghadapi kesulitan dan ketidakpastian yang ada di sekeliling mereka. Mereka mungkin telah belajar cara mengatasi dan menanggapi tantangan yang mereka hadapi, baik melalui pengalaman mereka sendiri atau dengan mengamati dan belajar dari orang dewasa di sekitar mereka. Melibatkan mereka dalam kegiatan DRR menyoroti ketahanan dan kepanjangan akal daya anak-anak dalam lingkungan yang menantang dan membantu mendidik dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Mereka dapat belajar tentang risiko bencana, langkah-langkah kesiapsiagaan, dan cara menanggapi dengan aman. Ketika anak-anak dididik dan berpartisipasi aktif, mereka dapat berkontribusi pada praktik yang lebih aman dan mengadvokasi DRR dalam keluarga dan masyarakat mereka. Mendidik dan melibatkan anak-anak dalam DRR dapat memberikan dampak yang langgeng pada generasi mendatang, karena mereka membawa pengetahuan dan pengalaman mereka hingga dewasa.

Tenaga kerja layanan sosial dapat mendukung keterlibatan anak-anak dan pemuda dalam DRR dengan mengambil “pendekatan budaya partisipasi” yang mengakui mereka sebagai pemegang hak yang dapat secara efektif berkontribusi terhadap DRR (Tabel 2).⁶⁷ Tenaga kerja layanan sosial diposisikan secara unik untuk terlibat dengan anak-anak dan pemuda yang paling rentan dan kurang beruntung, yang pada gilirannya dapat meneruskan kesadaran dan pengetahuan mereka kepada orang dewasa di sekitar mereka. Tindakan-tindakan di bawah ini tidak boleh dilihat terpisah dari pekerjaan sosial penting yang dirinci di atas, tetapi lebih jauh menguraikan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk DRR yang berpusatkan anak.

66 UNICEF (2019) Lingkungan yang Layak untuk Anak – Pendekatan UNICEF terhadap Perubahan Iklim.

67 Mort, M., Rodríguez-Giralt, I., & Delicado, A. (Eds.). (2020). *Children and Young People's Participation in Disaster Risk Reduction: Agency and Resilience* (1st ed.). Bristol University Press.

Tabel 1: Peran dan tindakan penting SSW untuk memastikan Layanan DRR berpusatkan anak

Peran dan tindakan penting tenaga kerja layanan sosial untuk memastikan DRR yang berpusatkan anak

3.1 Penilaian risiko partisipatif dan perencanaan di tingkat masyarakat

- Social Pekerja sosial dan pihak lain dalam SSW harus memastikan bahwa anak-anak terlibat dalam proses partisipatif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko bencana dan perubahan iklim serta dampak potensial. Karena anak perempuan, khususnya, sering terkena dampak bencana secara tidak proporsional, dan menghadapi kerentanan yang unik, mereka memiliki wawasan berharga untuk berkontribusi pada identifikasi dan penilaian risiko. Partisipasi anak yang bermakna harus lebih dari sekadar melibatkan anak perempuan dan laki-laki dalam diskusi, memastikan suara dan kebutuhan mereka didengar tidak hanya dalam penilaian risiko, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

3.2 Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

- Karena anak-anak dan kaum muda adalah pemangku kepentingan penting dalam DRR, SSW harus mendorong dan mendukung partisipasi mereka dalam DRR dengan melibatkan anak-anak dan pemuda, misalnya menggunakan panduan sumber daya UNDRR.
- Mengembangkan strategi komunikasi yang ramah anak, mudah diakses disabilitas, dan materi yang sesuai usia yang menjelaskan risiko dan langkah-langkah tanggap bencana dengan cara yang mudah dipahami anak-anak dan melibatkan pendekatan antarteman sebaya.⁶⁸
- Memberikan pendidikan sesuai usia kepada anak-anak tentang risiko bencana, kesiapsiagaan, dan langkah-langkah keselamatan termasuk pengetahuan pertolongan pertama. Ini dapat mencakup pelaksanaan program kesadaran di sekolah dan masyarakat. Bekerja sama dengan anak-anak untuk mengembangkan rencana kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang berpusatkan anak. Rencana ini harus sesuai dengan usia, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas perkembangan anak-anak.
- Memberdayakan anak-anak untuk berkontribusi ide, perhatian, dan solusi mereka untuk pengurangan risiko bencana yang efektif dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

3.3 Mobilisasi Masyarakat

- Libatkan masyarakat dalam kegiatan DRR, dengan menekankan pentingnya keselamatan anak. Pekerja sosial, dan SSW yang lebih luas, dapat memfasilitasi dialog masyarakat, lokakarya, dan sesi pelatihan serta memastikan bahwa pesan-pesan tersebut sesuai dan dapat diakses oleh anak-anak dari berbagai usia dan kemampuan, dan memastikan sebisa mungkin pendekatan kontekstual dan bawah-atas terhadap kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko.⁶⁹

⁶⁸ UNDRR (2019) The 4P framework: Pendekatan berprinsip untuk melibatkan pemuda dalam pengurangan risiko dan ketahanan dan UNDRR (2020) Panduan Kata-kata untuk Melibatkan Anak-anak dan Pemuda dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Membangun Ketahanan.

⁶⁹ Salah satu contoh pendekatan tersebut adalah model 'desa siaga bencana' di Indonesia.

Tabel 1: Peran dan tindakan penting SSW untuk memastikan Layanan DRR berpusatkan anak

Peran dan tindakan penting tenaga kerja layanan sosial untuk memastikan DRR yang berpusatkan anak

3.4 Dukungan Anak-anak Rentan

- Bekerja sama dengan keluarga untuk memastikan mereka cukup siap menghadapi bencana. Pekerja sosial, dan SSW yang lebih luas, dapat membantu keluarga mengembangkan rencana darurat, membuat perlengkapan bencana, dan memenuhi kebutuhan khusus anak-anak dalam konteks keluarga, termasuk mereka yang dengan disabilitas.
- Mengadvokasi dan mendukung keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak selama dan setelah bencana. Menyiapkan ruang belajar sementara yang inklusif dan mudah diakses penyandang disabilitas dan menyediakan materi pendidikan, termasuk materi pembelajaran yang mudah diakses.

3.5 Dukungan Psikososial

- Memberikan pertolongan pertama psikologis dan dukungan psikososial kepada anak-anak sebelum, selama, dan setelah bencana.
- Memberikan konseling, dan jika diperlukan dukungan kesehatan mental spesialis.
- Ciptakan ruang yang aman dan mudah diakses bagi anak untuk bermain dan mengekspresikan perasaan dan ketakutan mereka dengan dukungan fasilitator terlatih.
- Gunakan prinsip perawatan yang berwawasan trauma saat menangani anak-anak yang mengalami peristiwa traumatis. Kenali tanda-tanda trauma dan rujuk untuk dukungan spesialis.

3.6 Pengamanan, Manajemen Kasus Perlindungan Anak dan Perawatan Alternatif

- Membangun sistem perlindungan anak dan pengamanan yang sudah ada, dan memastikan adanya mekanisme yang berlaku selama dan setelah bencana, untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak, atau pemisahan anak dari keluarga mereka.
- Berikan perhatian khusus pada kebutuhan unik dan kerentanan yang meningkat terhadap bencana dan pengungsian anak-anak di sekolah asrama, bentuk-bentuk perawatan residensial lainnya, dan perawatan alternatif secara lebih luas.
- Menilai risiko, mengembangkan kebijakan, dan jika perlu mengambil langkah segera, untuk mencegah dan menangani adopsi ilegal dan perdagangan anak-anak dari daerah terkena bencana.
- Pastikan manajemen dan sistem informasi dan protokol tersedia untuk manajemen kasus, termasuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan, serta menyetujui dan mengoordinasikan jalur rujukan dengan lembaga atau aktor yang mungkin perlu dirujuk kasusnya.
- Menilai dan menentukan kepentingan terbaik anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, dan untuk penelusuran dan penyatuan kembali keluarga.
- Hindari pelembagaan anak-anak yang terpisah, termasuk anak-anak dengan disabilitas, bahkan di tempat penampungan sementara, dengan memastikan pengaturan perawatan alternatif berbasis keluarga dan masyarakat yang sesuai dibuat untuk anak-anak bila diperlukan. SSW juga dapat membantu merekrut, menilai, dan melatih kekerabatan sementara dan pengasuh angkat untuk tujuan ini.⁷⁰

⁷⁰ Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2022) CRPD/C/5: Pedoman tentang deinstitusionalisasi, termasuk dalam keadaan darurat.

- Menetapkan prosedur pelaporan yang dapat diakses dan menanggapi masalah perlindungan anak. Mengelola kasus terkait bencana, menghubungkan individu dan keluarga yang terkena dampak ke layanan yang diperlukan, termasuk tempat berteduh, perawatan kesehatan, dan bantuan keuangan.

Tabel 1: Peran dan tindakan penting SSW untuk memastikan Layanan DRR berpusatkan anak

Peran dan tindakan penting tenaga kerja layanan sosial untuk memastikan DRR yang berpusatkan anak

3.7 Advokasi

- Tenaga kerja layanan sosial dapat menjadi juara kebijakan dan praktik yang memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan anak selama keadaan darurat.
- Mengadvokasi hak-hak anak, untuk memastikan bahwa dalam upaya DRR, kebutuhan, kerentanan, dan perspektif unik mereka dipertimbangkan dalam kebijakan dan program.
- Pastikan bahwa layanan dan fasilitas DRR dapat diakses dan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas dan bahwa mereka diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dan/atau evakuasi. Advokasikan jalur landai, komunikasi yang dapat diakses, dan rencana evakuasi yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan anak-anak.

3.8 Inklusi gender dan sosial

- Memastikan anak perempuan, termasuk anak perempuan dengan disabilitas, diikutsertakan dalam perencanaan dan respons serta langkah-langkah khusus untuk menangani kebutuhan populasi rentan dan terpinggirkan tersedia. Misalnya, pekerja sosial harus memiliki keterampilan yang tepat untuk komunikasi secara efektif dengan anak-anak dari budaya lain termasuk anak-anak dengan disabilitas, etnis minoritas, dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam.⁷¹

⁷¹ Akronim untuk orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks.



4. Implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk memperkuat SSW dalam DRR-CCA

Secara keseluruhan, strategi dan kebijakan DRR dan CCA harus melibatkan pendekatan seluruh pemerintah, dan kebijakan serta praktik DDR-CCA harus diperkuat sedemikian rupa sehingga berpusat pada anak dan bertransformatif gender, serta inklusif dan mudah diakses penyandang disabilitas. SSW harus ditempatkan dengan baik untuk memastikan bahwa kebijakan DDR-CCA benar-benar dilaksanakan dengan cara yang inklusif dan mudah diakses, memastikan keterlibatan masyarakat yang bermakna dan mempromosikan tindakan iklim dan kesiapsiagaan yang dipimpin masyarakat. Pada gilirannya, peran SSW dalam DRR-CCA dapat diperkuat dengan mengarusutamakan konsep dan pendekatan DRR dan CCA dalam semua pekerjaannya, serta memposisikan dirinya sebagai mitra utama, termasuk dalam mekanisme koordinasi dan dalam upaya yang dipimpin oleh lembaga iklim dan bencana di tingkat nasional dan sub-nasional.

Rekomendasi untuk memperkuat SSW dalam DRR-CCA

Berikut ini adalah rekomendasi rinci bagi para pembuat kebijakan dan praktisi untuk Perencanaan, Pengembangan dan Dukungan terhadap SSW guna memperkuat perannya dalam DRR-CCA.

Tabel 2. Rekomendasi untuk Perencanaan, Pengembangan dan Dukungan SSW untuk memperkuat perannya dalam DRR-CCA

PERENCANAAN

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini		
Pembuat kebijakan nasional	Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA	Pengelolaan SSW
Mengembangkan dan menerbitkan undang-undang, peraturan, dan perintah eksekutif yang menetapkan peran SSW dan mewajibkan integrasinya dalam DRR-CCA, serta memprioritaskan SSW. Mencakup persyaratan sertifikasi untuk peran khusus dalam DRR dan CCA.	Merevisi tata kelola dan struktur koordinasi DRR-CCA nasional dan lokal untuk memastikan inklusi dan keterlibatan SSW, dengan prosedur dan modalitas yang ditetapkan untuk kerja kolaboratif, yang melibatkan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, struktur masyarakat, untuk memungkinkan sinergi dan mencegah duplikasi.	Menetapkan perwakilan/entitas SSW yang ditunjuk di tingkat nasional dan sub-nasional sebagai anggota tata kelola dan struktur koordinasi DRR-CCA. Pastikan keterlibatan SSW tingkat masyarakat.
Memastikan penyertaan SSW dalam rencana, strategi, dan kebijakan DRR-CCA nasional/lokal. Ini berarti memformalkan keterlibatan SSW dalam penilaian risiko bencana reguler dan secara umum dalam sistem pengumpulan data untuk menginformasikan analisis, perencanaan, dan pembiayaan untuk kesiapsiagaan dan respons. SSW dapat membantu memastikan data dan analisis bersifat komprehensif,	Memastikan keterlibatan SSW dalam tinjauan berkala pengaturan peringatan dini multi-bahaya termasuk: (a) penilaian risiko bencana reguler; (b) sistem informasi peringatan dini; (c) jaringan komunikasi untuk penyampaian informasi yang tepat waktu,	Conduct DRR-CCA knowledge/capacity/practice assessments of SSW at national and sub-national levels (incl. on collaboration with climate and disaster authorities).
		Mengembangkan materi kesadaran dan komunikasi mengenai peran dan fungsi SSW dalam proses DRR-CCA, termasuk untuk dimasukkan dalam materi yang dikeluarkan lembaga DRR/CCA.

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini

Pembuat kebijakan nasional

dipilah (berdasarkan usia, gender, dan disabilitas) dan dikumpulkan melalui proses yang inklusif dan partisipatif serta berdasarkan sumber data terkini di tingkat komunitas)

Terbitkan manual, pedoman, dan SOP terpadu tentang kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan yang ditujukan kepada pekerja sosial dan pekerja layanan sosial lainnya serta pemangku kepentingan DRR dan Iklim (mendefinisikan peran, fungsi, dan kompetensi inti yang penting dalam ketahanan iklim dan pendekatan yang mempertimbangkan risiko bencana. Sertakan perangkat DRR yang berpusatkan anak yang mencakup praktik terbaik untuk partisipasi anak, dukungan kesehatan mental, dan memastikan keselamatan anak, termasuk dalam skenario pengungsian dan risiko perlindungan terkait seperti perpisahan keluarga.)

Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA

dan (d) kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat untuk bertindak atas informasi peringatan dini.

Memastikan keterlibatan SSW dalam komunikasi risiko dan platform penyebaran luasan publik, khususnya dalam melokalisasi materi informasi tentang risiko bencana.

Pengelolaan SSW

Koordinasi dan kolaborasi: merancang pengaturan kolaboratif dalam tata kelola DRR-CCA dan struktur koordinasi, untuk memastikan data terpilih yang dikumpulkan di seluruh sistem layanan sosial tersedia dan menjadi bagian dari basis pengetahuan DRR-CCA.

Mengembangkan parameter dan protokol untuk memungkinkan interoperabilitas yang aman antara sistem manajemen informasi layanan sosial (IMS) dengan TIK penanggulangan bencana.⁷²

Mengintegrasikan penanda iklim dalam manajemen kasus dan sistem manajemen informasi, untuk melacak titik panas dan hubungan antara dampak perubahan iklim dan isu perlindungan/kesejahteraan yang berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pastikan data SSW menginformasikan penilaian risiko dan dampak, sistem peringatan dini, rencana kesiapsiagaan dan tanggap bencana, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, manajemen lingkungan dan migrasi.

⁷² Information and Communication Technology (ICT) Peta Jalan Penanggulangan Bencana untuk Tahun 2025 dan Selanjutnya (Peta Jalan TIK).

Melakukan penelitian untuk memetakan dan menilai jumlah, komposisi, dan kapasitas SSW saat ini yang tersedia untuk dimobilisasi untuk, atau sudah terlibat dalam, kampanye, program, dan layanan DRR dan CCA. Berdasarkan temuan ini, menilai sejauh mana jumlah dan kapasitas tenaga kerja mungkin perlu ditingkatkan (termasuk pada tingkat apa dan distribusi geografis) untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan DRR dan CCA yang efektif.

Jika terjadi pengungsian akibat bencana, pastikan penyertaan SSW:

i) dalam sistem untuk mengumpulkan, menganalisis, dan berbagi data (misalnya pelacakan pengungsian, kerusakan, kerugian, dan penilaian kebutuhan pemulihan...).

ii) ketika merancang langkah-langkah pengurangan risiko seperti evakuasi atau relokasi terencana. Atau saat membangun sistem pendukung berbasis wilayah untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap pengungsian

iii) dalam rencana dan program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Mengintegrasikan secara memadai langkah-langkah layanan sosial untuk membantu masyarakat yang mengungsi akibat bencana mencapai solusi yang berkelanjutan, dan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan kelompok yang paling terdampak dan rentan.

Mempromosikan kolaborasi di tingkat masyarakat dengan pemangku kepentingan DRR dan CCA setempat, termasuk untuk konsultasi dan keterlibatan dengan masyarakat rawan risiko bencana dan struktur berbasis masyarakat mengenai pemetaan risiko dan sumber daya, penyediaan informasi, rencana kesiapsiagaan iklim dan bencana.

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini

Pembuat kebijakan nasional

Mengembangkan rencana penguatan dan penyebaran SSW untuk DRR dan CCA - jumlah yang dibutuhkan pada berbagai tingkatan, dalam berbagai peran dan dengan kapasitas khusus, serta keseluruhan biaya (operasional) jangka pendek dan jangka panjang. Terapkan **pedoman regional ASEAN tentang penggunaan rasio dan biaya dalam perencanaan SSW** untuk merencanakan dan menghitung biaya investasi tambahan yang diperlukan, yang diinformasikan oleh penilaian kebutuhan yang belum terpenuhi dan kapasitas saat ini.

Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA

Pengelolaan SSW

Pemantauan, evaluasi, akuntabilitas dan pembelajaran: memastikan pengumpulan, analisis dan pembagian data berkelanjutan mengenai kinerja dan hasil SSW dalam DRR & CCA, untuk menginformasikan perencanaan masa depan, pengembangan kapasitas dan kebijakan serta praktik dukungan tenaga kerja, dan memastikan pembagian pembelajaran tersebut secara berkelanjutan di seluruh wilayah.

MENGEMBANGKAN

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini		
Pembuat kebijakan nasional	Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA	Pengelolaan SSW
Mengembangkan strategi peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja layanan sosial, dan rencana pelatihan multidisiplin dan antar sektor, baik untuk memperkuat kerja SSW, dan untuk memfasilitasi kolaborasi dengan sektor terkait, dalam pengurangan bencana dan risiko bencana, dan untuk mengembangkan keterampilan SSW untuk bekerja dalam situasi bencana, dan pengungsian dan ketahanan iklim. Mendorong dan memberikan dukungan teknis ke lembaga pelatihan untuk memasukkan adaptasi iklim, praktik ramah lingkungan dan pekerjaan sosial dalam pengurangan risiko bencana dalam kurikulum pelatihan pekerjaan sosial, dan pastikan mencakup semua bidang keterampilan dan fungsi utama yang tercantum di atas dan terus-menerus diinformasikan oleh penelitian dan bukti mengenai praktik yang efektif, termasuk dalam penggunaan teknologi baru.	Memastikan peran dan fungsi pekerja sosial dan layanan sosial terintegrasi dalam program pelatihan mengenai DRR dan CCA untuk lembaga dan pemangku kepentingan bencana dan iklim nasional dan sub-nasional (konten akan dikembangkan berkolaborasi dengan Manajemen Tenaga Kerja Layanan Sosial) Melibatkan pekerja sosial dan pihak lain pada SSW dalam pengembangan dan adaptasi teknologi untuk memungkinkan penilaian dan respons risiko yang lebih efektif, manajemen informasi dan komunikasi dalam DRR, CCA dan dalam respons terhadap bencana.	Melakukan penilaian kebutuhan pelatihan yang difokuskan pada peran SSW dalam DRR dan CCA. Merancang dan menyampaikan program peningkatan kapasitas lintas sektor, dan perangkat pelatihan yang menyertainya, untuk SSW (meliputi pelatihan pra dan dalam jabatan; para profesional, relawan, dan aktor berbasis masyarakat) dengan modul khusus tentang pengurangan risiko bencana dan pendekatan serta perangkat yang tanggap dan tangguh terhadap iklim, yang mencakup pengetahuan minimum dan kompetensi inti untuk mengatasi risiko multidimensi dan dampak perubahan iklim baik dalam konteks kemanusiaan maupun pembangunan.

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini

Pembuat kebijakan nasional

Pada tingkat regional, dukung pengembangan kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan ASEAN untuk Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (ATCSW) dan Pusat AHA untuk SSW dan NDMA mengenai integrasi Layanan Sosial/SW dalam DRR dan Adaptasi Iklim.

Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA

Pengelolaan SSW

Meliputi penilaian risiko masyarakat, melibatkan dan memberdayakan relawan dan pemimpin masyarakat, MHPSS dan pertolongan pertama psikologis, ditambah pelatihan keterampilan khusus anak (seperti komunikasi berpusatkan anak, perawatan berwawasan trauma, pencegahan dan respons terhadap perpisahan keluarga, perawatan anak penyintas GBV, dan pendidikan kesiapsiagaan bencana sesuai usia dan inklusif disabilitas) dalam kurikulum pelatihan.

Meliputi latihan praktis di seluruh kurikulum pelatihan untuk memastikan pengembangan kompetensi menyeluruh termasuk keterampilan praktis.

Melaksanakan kegiatan simulasi, jika memungkinkan dengan melibatkan staf dan relawan dari berbagai sektor dan spesialisasi yang terlibat dalam DRR dan CCA.

Merekrut, melatih, dan mendukung kader pelatih utama guna memastikan keberlanjutan program pelatihan ini. Investasi, mengembangkan, dan/atau meningkatkan platform pelatihan dan pembelajaran online/offline untuk mengoptimalkan cakupan dan jangkauan dan menawarkan kesempatan pembelajaran berkelanjutan, khususnya bagi para-pekerja sosial dan relawan masyarakat.

MENDUKUNG

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini		
Pembuat kebijakan nasional	Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA	Pengelolaan SSW
Mengembangkan peraturan dan SOP yang melindungi keselamatan dan kesejahteraan SSW yang terlibat dalam DRR-CCA khususnya selama tanggap bencana, termasuk mewajibkan bentuk dukungan, konseling, tunjangan bahaya, dan waktu istirahat serta cuti yang sesuai. Menciptakan sistem dan jaringan untuk pengawasan profesional dan dukungan sebaya bagi pekerja sosial dan pihak lain dalam SSW yang bekerja dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi serta ketahanan iklim, tidak hanya agar mereka menerima dukungan dan bimbingan teknis untuk mempersiapkan, merefleksikan dan menangani kasus dan situasi yang paling rumit, tetapi juga untuk membantu melindungi dan mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, dan mencegah efek negatif jangka panjang dari trauma sekunder, reaksi non-adaptif terhadap stres dan kelelahan.	Melibatkan SSW dalam komunitas praktik DRR-CCA, untuk memastikan sektor layanan sosial berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertukaran praktik yang efektif, pelajaran yang dipetik dan inovasi. Melibatkan SSW dalam peninjauan dan revisi regulasi kebijakan dan rencana pengurangan risiko bencana dan iklim (termasuk mencerminkan kebutuhan yang muncul, pelajaran yang dipetik, dan untuk mengintegrasikan inovasi). Melibatkan SSW dalam peningkatan berkelanjutan sistem manajemen informasi DRR-CCA (IMS), untuk memastikan interoperabilitas yang aman dan etis dengan IMS lain dan pemetaan kerentanan (misalnya perlindungan anak, pendidikan, kesehatan). Hal ini akan memungkinkan untuk mengakses, menggunakan, dan meningkatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (misalnya aplikasi ponsel untuk memasukkan informasi yang diberi tag dan berlokasi geografis dengan tepat baik dalam penilaian risiko maupun kesiapsiagaan, dan sebagai bagian respons bencana).	Penyediaan informasi: Mendukung tenaga layanan sosial untuk menggunakan saluran informasi di tingkat akar rumput yang memperkuat, melengkapi, dan menemukan sinergi dengan kampanye komunikasi dan kesiapsiagaan Risiko Bencana dan Iklim nasional dan sub-nasional. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme untuk melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan SSW yang bekerja di DRR-CCA, khususnya ketika menanggapi bencana, termasuk melalui memastikan keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja, memastikan waktu istirahat dan pemulihan dan cuti yang cukup, dan melalui telepon dan online, dukungan dan konseling manajer dan rekan sebaya di tempat.⁷³ Mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja dan mekanisme untuk mengawasi pekerja sosial dan pihak lainnya dalam SSW, untuk mendukung mereka dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, dan untuk memungkinkan mereka terus mengembangkan keterampilan praktik mereka.

⁷³ An Salah satu contoh dukungan tersebut adalah maraknya penggunaan aplikasi pengiriman pesan melalui telepon seluler untuk mendukung SSW selama pandemi COVID-19. GSSWA (2021): Laporan Keadaan Tenaga Kerja Layanan Sosial 2020.

Para pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi ini

Pembuat kebijakan nasional

Mengembangkan mekanisme kolaboratif bagi pemangku kepentingan terkait di sektor terkait, untuk membantu memastikan mereka dapat mendukung tenaga layanan sosial untuk melaksanakan peran dan menjalankan fungsi serta tugas mereka dalam DRR dan CCA.

Alokasikan anggaran yang cukup untuk mencakup tunjangan yang diperlukan pekerja sosial dan SSW yang lebih luas yang bekerja pada DRR-CCA seperti kompensasi memadai, asuransi, tunjangan (misalnya tunjangan bahaya, tunjangan perumahan dan perjalanan), terutama selama penempatan terkait bencana. Tunjangan ini dapat disesuaikan dengan sumber daya dan kapasitas yang ada, inflasi, dan kenaikan harga yang tiba-tiba yang mungkin terjadi selama situasi bencana dan krisis.⁷⁴

Mempromosikan dan memberikan visibilitas dan pengakuan yang lebih besar melalui pengelompokan dan inisiatif promosi lainnya terhadap peran SSW dalam DRR dan CCA.⁷⁵

Lembaga Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan DRR dan CCA

Pengelolaan SSW

Memastikan tanggung jawab manajer dan supervisor untuk menyediakan pengawasan teknis dan suportif secara berkala bagi SSW dalam DRR-CCA diakui dalam uraian tugas dan SOP, dan kapasitas mereka untuk melakukannya dibangun melalui pelatihan yang sesuai dan berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas dan status asosiasi profesional pekerja sosial (atau SSW lebih luas) untuk mengadvokasi, dan mengembangkan pedoman dan standar untuk meningkatkan praktik SSW dalam DRR dan CCA, dan untuk meningkatkan pengakuan perannya dalam bidang pekerjaan ini.

Mengembangkan sistem informasi terpadu (dalam departemen di suatu organisasi dan antar organisasi yang berbeda) untuk intervensi dan manajemen masyarakat yang terkena dampak bencana

⁷⁴ Di Filipina, SSW diberikan tunjangan harian sekitar 50 peso, serta tunjangan perumahan dan biaya hidup.

⁷⁵ Ini dapat mencakup 'pencitraan' SSW yang lebih jelas, seperti dengan menyediakan pakaian berlabel jelas dengan warna yang telah disepakati sebelumnya dan meningkatkan kesadaran publik bahwa pakaian ini menunjukkan anggota SSW yang memainkan peran penting dalam pengurangan risiko bencana, respons, atau pemulihan. Misalnya, 'Malaikat berrompi merah' diluncurkan untuk menghormati tenaga kerja DSWD | Philippine News Agency (pna.gov.ph).

5. Kesimpulan

Proses dan peluang ke depan

Serangkaian implikasi dan rekomendasi kebijakan tingkat nasional ini perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui koordinasi erat antara badan/komite sektoral regional ASEAN yang bertanggung jawab atas DRR/CCA dan SSW,⁷⁶ termasuk dalam kolaborasi DRR-CCA lintas batas dan secara umum melalui inisiatif, perangkat, dan platform regional (termasuk penilaian dan pemantauan kerentanan dan risiko; perjanjian berbagi data; program pengembangan kapasitas dan pelatihan; platform kesadaran risiko dan materi informasi).

Prioritas keseluruhan adalah untuk memperkuat integrasi SSW-DRR-CCA melalui koordinasi, perencanaan, kebijakan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan pada akhirnya agar integrasi ini dapat diwujudkan dalam tindakan kesiapsiagaan, respons dan pemulihan lokal.

ASEAN memfasilitasi integrasi yang diperlukan dengan:

- Mempromosikan peluang untuk memperkuat integrasi dan kemitraan di seluruh ASEAN: Misalnya pada Konferensi Tingkat Menteri Asia-Pasifik tahunan tentang DRR (APMCDRR) Mengembangkan ringkasan praktik baik AMS mengenai upaya terpadu di seluruh SSW-DRR-CCA, termasuk:
 - i) rencana terpadu, perangkat, program pengembangan kapasitas, sistem pengumpulan data, mekanisme koordinasi (misalnya Malaysia, mekanisme dana bencana memberikan insentif berbagi data)
 - ii) pendekatan yang inklusif, mudah diakses, dan dipimpin masyarakat terhadap perubahan iklim dan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana (misalnya, penanggulangan bencana berbasis masyarakat Indonesia dan kegiatan CCA, termasuk pra-posisi pasokan di tingkat provinsi dan kabupaten)
 - iii) kontekstualisasi dan peluncuran pedoman ini di tingkat nasional dan sub-nasional.
- Melaksanakan pelatihan pra-dan dalam jabatan mengenai peran SSW dalam DRR dan CCA. Memanfaatkan platform pembelajaran yang ada untuk i) SSW (mengintegrasikan DRR dan CCA dalam kurikulum pekerjaan sosial dan layanan sosial) termasuk memanfaatkan Pusat Pelatihan ASEAN untuk Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (ATCSWS) ii) pemangku kepentingan DRR dan Iklim (mengintegrasikan modul tentang peran SSW).

⁷⁶ Badan-badan tersebut meliputi: ACDM, AHA Centre, Regional dan National ASEAN secretariats, ASEAN sectoral bodies, ASEAN Social Work Consortium.

Lampiran A: Komitmen regional dan nasional pada hak asasi manusia, hak anak, kesetaraan gender, dan hak atas perlindungan sosial

Global	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	1979
	Konvensi Hak-Hak Anak (CRC)	1989
	Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)	2006
	Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)	
	SDG 1.3: Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk yang mendasar, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi masyarakat miskin dan rentan	
	SDG 5.2: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual, serta jenis-jenis eksploitasi lainnya.	
	SDG 5.3: Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan.	
Regional	SDG 16.2: Mengakhiri pengungkapan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak-anak.	
	Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN 2025	2016
	Visi Komunitas ASEAN 2025	2015
	Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Perempuan dan Anak-anak ASEAN	2010
	Deklarasi Hanoi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial untuk Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif	2020
	Peta Jalan ASEAN untuk Implementasi Deklarasi Hanoi tentang Penguatan Pekerjaan Sosial untuk Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif	2021
	Kerangka Kerja Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi dalam Manajemen Bencana 2021-2025 (ARF-PGI)	2021
	Deklarasi ASEAN tentang Penguatan Perlindungan Sosial	2013
	Kerangka Kerja Regional dan Rencana Aksi untuk Mengimplementasikan Deklarasi ASEAN tentang Memperkuat Perlindungan Sosial	2018
	Deklarasi Bali tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Komunitas ASEAN dan Kerangka Kerja Mobilisasi Dekade Penyandang Disabilitas ASEAN	2011
	Rencana Induk Pemberdayaan ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	2018
	Deklarasi Kuala Lumpur tentang Penuaan: Memberdayakan Orang Lanjut Usia di ASEAN	2015
	Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak	2012
	Rencana Aksi Regional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Rencana Aksi Regional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak Peta Jalan Komplementaritas 2020-2025	2019
	Deklarasi Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi Online dan Penyalahgunaan di ASEAN	2019
	Deklarasi ASEAN tentang Hak-hak Anak dalam Konteks Migrasi	2019
	Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran	2007
	Konsensus ASEAN tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran	2017



ASEAN: A COMMUNITY OF OPPORTUNITIES FOR ALL



Follow Us



[Privacy Policy](#) | [Disclaimer](#)